DEMOKRASI TERPIMPIN MENURUT KH. IDHAM CHALID DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2011 029 SJ
No REG : S-2011 / SJ / 029
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

Rasyid Hidayatullah
NIM: C03206036

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH
SURABAYA
2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Rasyid Hidayatullah (NIM: CO3206036) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 8 Juni 2011

Pembimbing,

Amirullah, S.Ag, MH.
NIP. 197201012003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rasyid Hidayatullah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Ketua,

Amirullah, S.Ag, MH.
NIP. 197201012003121002

Sekretaris,

Sri Wigati, M.E.I
NIP. 197302212009122001

Penguji I,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP.195601101987031001

Penguji II,

Dr. H.Sahid, H., M.Ag
NIP. 196803091996031002

Pembimbing,

Amirullah, S.Ag, MH.
NIP.197201012003121002

Surabaya, 22 Juli 2011
Mengesahkan
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. HA. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Rasyid Hidayatullah
NIM	: CO3206036
Jurusan	: Siyasah Jinayah
Fakultas	: Syari'ah
Institusi	: IAIN Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul DEMOKRASI TERPIMPIN MENURUT KH. IDHAM CHALID DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 16 Juni 2011

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

2EE5CAAF316224245

6000 DJP

Rasyid Hidayatullah

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk menjawab dua pertanyaan penelitian sebagai berikut : *Pertama*, Bagaimanakah latarbelakang pandangan Idham Chalid tentang Demokrasi Terpimpin? *Kedua*, Bagaimanakah analisis Fiqh Siyasah terhadap Demokrasi Terpimpin menurut pandangan Idham Chalid?

Data penelitian ini keseluruhannya diperoleh dan dihimpun melalui pembacaan teks *(text reading)* dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis kemudian kesimpulannya diambil melalui pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, atas dasar *amr ma'ruf nahi munkar* Idham bersedia menerima Demokrasi Terpimpin. Sikap (menerima) atas dasar pemikiran (*amar ma'ruf nahi munkar*) ini yang membuatnya berpendapat bahwa Islam dengan *syūra*-nya sesuai dengan Demokrasi Terpimpin. Suatu hal lalu menjadi jelas bahwa, baik pemikiran "*amar ma'ruf nahi munkar*" maupun "Islam sesuai dengan Demokrasi Terpimpin", semuanya adalah refleksi dari sikap "akomodatif" pada Idham. Pemikiran Idham Chalid tentang tentang Demokrasi Terpimpin dilatarbelakangi oleh kehidupannya yang merupakan perpaduan antara seorang yang dididik dari kultur Islam Tradisionalis yang dipadukan dengan corak pemikiran modernis.

Kedua, dalam konteks Fiqh Siyasah, Demokrasi Terpimpin menurut pandangan Idham Chalid dapat bersesuaian dengan nilai-nilai Islam. Asalkan mekanisme demokrasi dijalankan melalui jalan *al-syūra* (musyawarah) serta dibarengi dengan pengawasan oleh rakyat. Relevansinya terletak pada gagasannya untuk tetap mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Sikap dan pandangan moderat *(tawāzun)*, toleran *(tasāmuh)*, mengambil jalan tengah *(tawassuṭ)*, dan bersikap adil *(i'tidāl)*, yang dianut merupakan pilihan tepat yang inklusif dan akomodatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sikap dan pendangannya masih relevan untuk diimplementasikan dalam kondisi sekarang.

Bagi pembaca, yang lebih penting adalah mengaplikasikan gagasan-gagasan Idham Chalid dalam konteks keislaman dan keindonesiaan. Sikap dan pandangan moderat *(tawāzun)*, toleran *(tasāmuh)*, mengambil jalan tengah *(tawassuṭ)*, dan bersikap adil *(i'tidal)*, yang dianut merupakan pilihan tepat yang inklusif dan akomodatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks kepustakaan, penelitian yang secara intens mengkaji pemikiran Idham Chalid masih langka, alangkah bagusnya jika kemudian ada penelitian tentang gagasan-gagasan Idham Chalid di berbagai bidang. Sebab, meskipun tokoh berpengaruh, penelitian yang dilakukan untuk mengkaji pemikiran Idham Chalid masih minim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN..... vi
PERNYATAAN KEASLIAN vii
ABSTRAK..... viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Kerangka Teoritik..... 14
I. Metode Penelitian 15
J. Sistematika Pembahasan 20
BAB II BIOGRAFI KH. IDHAM CHALID 21
A. Latarbelakang Pendidikan 21
B. Karier Politik..... 26
C. Demokrasi Terpimpin dalam Pandangan Idham Chalid..... 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III DEMOKRASI TERPIMPIN 50
A. Konsepsi Demokrasi Terpimpin 50
B. Demokrasi Terpimpin dan Partai Politik 57

BAB IV ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMIKIRAN KH. IDHAM CHALID TENTANG DEMOKRASI TERPIMPIN..... 62
A. Latarbelakang Pemikiran KH. Idham Chalid tentang Demokrasi Terpimpin..... 62
B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pemikiran KH Idham Chalid tentang Demokrasi Terpimpin..... 69

BAB V PENUTUP 78
A. Kesimpulan 78
B. Saran-saran 79

DAFTAR PUSTAKA .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membacakan sebuah Dekrit yang menandai dimulainya babak baru dalam sejarah bangsa Indonesia, yakni Demokrasi Terpimpin. Perubahan itu juga diikuti dengan perombakan secara radikal terhadap hampir seluruh bagian kehidupan bernegara yang disahkan sebagai tahun kembali ke revolusi 1945. Masyarakat dibawa ke dalam suasana progresif-revolusioner, dan diajak untuk bergotong-royong melanjutkan revolusi. Ideologi dirumuskan kembali, sedangkan alat-alat negara yang telah usang harus diganti (*retooling*). Norma-norma politik yang ada dimasa lalu dianggap tidak berlaku lagi dan dikubur dalam-dalam.[1]

Sementara itu, pelbagai kekuatan politik yang sebelumnya tidak begitu berperan, kini mulai mengambil-alih jalannya sejarah. Di bawah UUD 1945 yang diberlakukan kembali, Soekarno yang pada masa Demokrasi Parlementer hanya berkedudukan sebagai simbol, kini menjadi presiden seutuhnya, tokoh yang menguasai, dan sumber kepemimpinan ideologi. Diakuinya kembali UUD 1945 juga menaikkan posisi politik militer, dalam hal ini Angkatan Darat. Angkatan Darat yang sejak diberlakukannya *Staat van Oorlog en Beleg* (SOB) tahun 1957 dengan leluasa terjun di bidang non-militer, kini makin memantapkan kedudukan

[1] Herbert Crouch, *Militer & Politik di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1999), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik mereka.[2] Di saat mayoritas partai politik mengalami delegitimasi yang serius, PKI, yang bangkit sepanjang dasawarsa 1950-an, memperoleh kesempatan untuk tampil secara fenomenal di panggung politik.

Soekarno dengan konsep Demokrasi Terpimpinnya menilai Demokrasi Barat yang bersifat liberal tidak dapat menciptakan kestabilan politik. Menurut Soekarno, penerapan sistim Demokrasi Barat menyebabkan tidak terbentuknya pemerintahan kuat yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia. Pandangan Soekarno terhadap sistem liberal ini pada akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan partai politik di Indonesia. Partai politik dianggap sebagai sebuah penyakit yang lebih parah daripada perasaan kesukuan dan kedaerahan. Penyakit inilah yang menyebabkan tidak adanya satu kesatuan dalam membangun Indonesia. Partai-partai yang ada pada waktu itu berjumlah sebanyak 40 partai dan ditekan oleh Soekarno untuk dibubarkan. Namun demikian, Demokrasi Terpimpin masih menyisakan sejumlah partai untuk berkembang. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan Soekarno akan keseimbangan kekuatan yang labil dengan kalangan militer. Beberapa partai dapat dimanfaatkan oleh Soekarno untuk dijadikan sebagai penyeimbang.[3]

Pada masa Demokrasi Terpimpin, parlemen sudah tidak mempunyai kekuatan yang nyata. Sementara itu partai-partai lainnya dihimpun oleh Soekarno

---

[2] Herbert Feith, *Soekarno – Militer dalam Demokrasi Terpimpin*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 33.

[3] http://www.reformasi.net46.net/index.php?p=1_11_Demokrasi-Terpimpin (20 Januari 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menggunakan suatu ikatan kerjasama yang didominasi oleh sebuah ideologi. Dengan demikian partai-partai itu tidak dapat lagi menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok-kelompok yang diwakilinya. Partai politik tidak mempunyai peran besar dalam pentas politik nasional dalam tahun-tahun awal Demokrasi Terpimpin. Partai politik seperti NU dan PNI dapat dikatakan pergerakannya dilumpuhkan karena ditekan oleh presiden yang menuntut agar mereka menyokong apa yang telah dilakukan olehnya. Sebaliknya, golongan komunis memainkan peranan penting dan temperamen yang tinggi. Pada dasarnya sepuluh partai politik yang ada tetap diperkenankan untuk hidup, termasuk NU dan PNI, tetapi semua wajib menyatakan dukungan terhadap gagasan presiden pada segala kesempatan serta mengemukakan ide-ide mereka sendiri dalam suatu bentuk yang sesuai dengan doktrin presiden. [4]

Soekarno berusaha mengumpulkan seluruh kekuatan politik yang saling bersaing dari Demokrasi Terpimpin dengan jalan turut membantu mengembangkan kesadaran akan tujuan-tujuan nasional. Ia menciptakan suatu ideologi nasional yang mengharapkan seluruh warga negara memberi dukungan kesetiaan kepadanya. Pancasila ditekankan olehnya dan dilengkapi dengan serangkaian doktrin seperti Manipol-Usdek dan Nasakom. Dalam usahanya mendapatkan dukungan yang luas untuk kampanye melawan Belanda di Irian Barat dan Inggris di Malaysia, ia menyatakan bahwa Indonesia berperan sebagai

[4] Herbert Crouch, *Militer & Politik di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1999), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu pimpinan "kekuatan-kekuatan yang sedang tumbuh" di dunia, yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh Nekolim (neokolonialis, kolonialis dan imperialis). Sebagai lambang dari bangsa, Soekarno bermaksud menciptakan suatu kesadaran akan tujuan nasional yang akan mengatasi persaingan politik yang mengancam kelangsungan hidup sistem Demokrasi Terpimpin.

Beberapa tahun sebelum Dekrit dibacakan, tepatnya pada bulan Februari 1957, Nahdlatul Ulama, sebagai salah satu kekuatan politik yang sangat diperhitungkan, tidak menunjukkan sikap yang tegas dalam menolak maupun menerima konsep Demokrasi Terpimpin yang digagas oleh Soekarno. Hal ini berbeda dengan Masyumi dan Partai Katolik yang menolak dengan keras gagasan Soekarno. Bahkan, dalam Sidang Pleno tanggal 9-10 Maret 1957, bersama-sama konsul se-Indonesia, NU akhirnya menyetujui gagasan tersebut, dengan syarat bahwa Dewan Nasional hanya berfungsi sebagai pensehat dan tidak mempunyai konsekwensi politis, dan pembentukannya dilakukan oleh kabinet bersama Kepala Negara.[5] Penerimaan tersebut sebetulnya lebih didasarkan pada prinsip *dar' al mafāsid muqaddamu 'ala jalb al-maṣālih* (menghindari bahaya didahulukan dari mengambil manfaat), karena kecenderungan Soekarno semakin dekat dengan komunis.[6]

---

[5] Choirul Anam, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama,* (Solo: Jatayu Press. Cet. I, 1985), 208

[6] Untuk tidak bisa menolak kedua-duanya—Soekarno dan komunis—maka mengambil sebagiannya merupakan salah satu keputusan politik yang didasarkan pada prinsip *ma la yudraku kulluh la yudraku julluh* (kewajiban tidak boleh ditinggalkan dengan alasan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun demikian, terjadi perbedaan pendapat di kalangan pucuk pimpinan NU tentang dukungan NU terhadap konsepsi Soekarno tersebut. Semua faksi di dalam NU menentang keikutsertaan kaum komunis dalam pemerintahan, tetapi banyak di antara mereka yang tidak mempunyai keberatan lain terhadap kebijakan Soekarno.[7] KH. Wahab Hasbullah, Rais Aam PBNU, yang juga pengagum berat Soekarno, mendukung gagasan Soekarno. Pemimpin NU di level Tanfidziyah seperti KH. A. Syaikhu, KH. Masykur, KH. Idham Chalid, dan KH. Saifuddin Zuhri dengan mudah menyesuaikan diri dengan konsep Demokrasi Terpimpinnya Soekarno. Tokoh NU yang paling tegas menolak adalah KH. Bisri Syansuri, KH. Achmad Siddiq, KH. KH. M. Dachlan (wakil ketua umum PBNU) dan Imron Rosyadi (Ketua GP Ansor).[8]

Menarik apabila melihat alasan yang dikemukakan oleh Idham Chalid, selanjutnya ditulis Idham, saat memutuskan menerima konsepsi Soekarno tersebut. Idham Chalid bahkan membela demokrasi terpimpin dengan mengatakan

---

bias dilakukan secara utuh). Di kalangan NU, penggunaan prinsip-prinsip *usul fiqh* seperti ini merupakan alat penting untuk memberikan legitimasi terhadap suatu keputusan atau tindakan. Lihat Asep Saiful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama ; Pergulatan Pemikiran Politik Radikal Dan Akomodatif,* (Jakarta: LP3ES. Cet I, 2004), 106

[7] Ada beberapa alasan, eratnya hubungan NU dengan Soekarno ini, yang telah kita sebutkan pada tahun 1940. Soekarno di kalangan NU diakui sebagai "pemimpin nasional": tulisan-tulisannya dibaca di kalangan santri selama masa penjajahan. Kemudian pada tahun 1952, dia mendukung kelompok tradisional ketika mereka membentuk partai politik sendiri dan harus mengatasi kelemahan relatif mereka dibanding dengan para modernis yang berpendidikan barat Juga ada ikatan klien misalnya antara Soekarno dengan Rois Aam-nya, Kiai Wahab, tetapi juga ada ikatan kesamaan yang nyata dan selera umum karena kebudayaan Jawa. Akhirnya mereka tidak jauh terpisah secara ideologis. Lihat Andree Feillard dalam http://pcinu-mesir.tripod.com/ilmiah/pusaka/ispustaka/buku03/001_1.txt

[8] Martin van Bruinessen, *NU Vis a Vis Negara,* (Yogyakarta: LKIS. Cet I, 1999), 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa demokrasi bukan tujuan pada dirinya, ia bisa memiliki batas-batas demi kesejahteraan rakyat. Di mata elit NU yang pro dengan Idham Chalid, kelemahan Soekarno adalah dukungannya pada PKI, tapi mereka tetap yakin dia akan menjatuhkan mereka. Pengikutsertaan merupakan prinsip yang menjadi pedoman sikap terhadap seseorang yang tidak pernah menyakitkan NU.[9]

Sebagai pucuk pimpinan NU, ia beranggapan bahwa dalam dengan mengikuti alur demokrasi terpimpin, maka NU akan terus bisa bermain di tengah-tengah arena politik, sekalipun bukan menjadi pemain utana, bahkan nyaris terhimpit di atara segitiga : soekarno, militer, dan PKI. Pada masa itu Idham menduduki jabatan sebagai ketua DPA, dan Front Nasional serta wakil ketua MPRS.[10]

Meskipun dengan keputusan ini NU dikecam, namun pada dasarnya Idham memiliki kecerdasan strategi politik. Inilah yang ia sebut sebagai filosofi air.

> *"Apabila air dimasukkan pada gelas maka ia akan berbentuk gelas, bila dimasukkan ke dalam ember ia akan berbentuk ember, apabila ia dibelah dengan benda tajam, ia akan terputus sesaat dan cepat kembali ke bentuk aslinya. Dan, air selalu mengalir ke temapat yang lebih rendah. Apabila disumbat dan dibendung ia bisa bertahan, bergerak elastis mencari resapan. Bila dibuatkan kanal ia mampu menghasilkan tenaga penggerak turbin listrik serta mampu mengairi sawah dan tanaman sehingga berguna bagi kehidupan makhluk di dunia.*[11]

---

[9] Andree Feillard, "Nahdlatul Ulama Dan Negara: Fleksibelitas, Legitimasi dan Pembaharuan", dalam http://pcinu-mesir.tripod.com/ilmiah/pusaka/ispustaka/buku03/001_1.txt (15 Desember 2010)

[10] Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik,* (Jakarta: Gramedia. Cet. I, 1998), 168.

[11] Dikutip dari Eka Dolok Martimbang, *Profil H. Syafriansyah: Pikiran dan Perilaku Islami,* (Banjarmasin: Keluarga Besar H. Syafriansyah, 2003), 106-107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun jika disimak dengan seksama, sesungguhnya KH Idham Chalid yang berlatarbelakang guru itu adalah seorang tokoh nasional (bangsa) yang visi perjuangannya dalam berbagai peran selalu berorientasi pada kebaikan serta manfaat bagi umat dan bangsa. Dengan visi perjuangan seperti itu, pemimpin NU selama 28 tahun (1955-1984), itu berpandangan tak harus kaku dalam bersikap, sehingga umat selalu terjaga kesejahteraan fisik dan spiritualnya. Apalagi situasi politik di masa demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila, tidak jarang adanya tekanan keras dari pihak penguasa serta partai politik dan Ormas radikal. Sebagai ketua umum ormas keagamaan, ia sangat mempengaruhi kebijakan NU yang saat itu menjadi partai. Duetnya dengan KH. A. Wahab Hasbullah membuat NU tahan menghadapi badai politik yang menghantam keras pada era itu. Tak heran jika Greg Fealy, seorang Indonesianis terkemuka menyebutnya "luwes" dalam bersikap dan sangat mempengaruhi NU pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an. [12]

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti pemikiran Idham tentang Demokrasi Terpimpin dan meninjaunya dengan menggunakan analisis *Fiqh Siyāsah.* Selain berusaha untuk membaca dan menganalilis tipologi pemikiran Idham, dengan memandang pemikirannya menangani konsep demokrasi terpimpin yang digagas oleh Soekarno. Meskipun telah ada peneliti yang membahas pemikiran Idham Chalid tentang pandangannya

---

[12] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid: Guru Politik Orang NU,* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pesantren, Cet. I, Juni 2007), 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seputar Demokrasi Terpimpin, namun sejauh penelusuran penulis hingga saat ini belum ada peneliti yang spesifik mengkaji pandangannya tentang Demokrasi Terpimpin dari perspektif *Fiqh Siyāsah.*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Konsep Demokrasi Terpimpin, sungguhpun memiliki tujuan mulia, namun banyak kalangan yang kurang sepakat dengan konsepsi Soekarno ini. Alasannya, saat itu memang negara kita butuh pemimpin tangguh, tetapi dikhawatirkan dengan tiadanya oposisi yang kuat, akan tumbuh gejala tiran atau diktator. Inilah mengapa kemudian selain banyak yang menolak gagasan ini, banyak pula yang mendukung, termasuk Idham Chalid sebagi pimpinan NU. Dari sini muncul problem, apakah demokrasi itu sendiri sesuai dengan Islam? Apakah Demokrasi Terpimpin juga selaras dengan Islam? Lalu bagaimanakah jika konsep Demokrasi Terpimpin ini ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyāsah*?

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menelisik lebih jauh pemikiran Idham chalid tentang Demokrasi Terpimpin. Terlebih saat itu ia berposisi sebagai pucuk pimpinan NU, yang juga menjadi bagian dari NASAKOM.

Agar pembahasan dalam skripsi ini tetap berpijak pada alur yang sistematis dan logis, maka penulis perlu mengidentifikasi dan membatasi masalah yang menjadi topik pembahasan. Di antara batas-batas pembahasan yang dipakai penulis adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, dalam pemikiran kenegaraan di Indonesia, terdapat beberapa fase perjalanan penting kepemimpinan nasional pada era Orde Lama. Dari Demokrasi Presidensial, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Liberal, hingga Demokrasi Terpimpin. Adapun dalam penelitian ini, penulis secara spesifik membatasinya hanya dalam koridor pembahasan seputar Demokrasi Terpimpin. Dan agar lebih fokus, kajian mengenai corak pemikiran tentang Demokrasi Terpimpin ini oleh penulis lebih difokuskan pada pembacaan terhadap sosok dan pemikiran Idham, sehingga nantinya pembaca bisa menilai dan menganalisis posisi maupun tipologi pemikiran Idham Chalid dalam corak pemikiran kenegaraan dan keagamaan.

Kedua, agar penelitian ini tetap fokus, maka penulis membatasi kajian pada pemikiran Idham Chalid tentang Demokrasi Terpimpin yang kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif *Fiqh Siyāsah.* Dengan demikian dalam penelitian ini penulis tidak membahas pemikiran Idham Chalid dalam bidang lain.

Melalui identifikasi dan pembatasan masalah ini, penulis berharap penelitian ini tetap fokus dan sistematis sehingga tidak melebar ke ranah pembahasan lainnya.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah serta identifikasi dan batasan masalah di atas, penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah, yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimanakah latarbelakang pandangan Idham Chalid tentang Demokrasi Terpimpin?
2. Bagaimanakah analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Demokrasi Terpimpin menurut pandangan Idham Chalid?

D. Kajian Pustaka

Idham Chalid sebagai salah satu tokoh yang banyak mewarnai pemikiran Islam dan politik Indonesia, menjadi obyek kajian beberapa penulis.

Di antara peneliti yang berusaha mengabadikan pemikiran-pemikiran Idham adalah Arief Mudatsir Mandan (editor), yang menulis perjuangan Idham Chalid melalui buku yang berjudul *Napak Tilas Perjuangan Idham Chalid : Tanggungjawab Politik NU dalam Sejarah.*[13] Buku setebal 466 halaman ini di samping memuat biografi, perjuangan dan pemikiran-pemikirannya, juga secara spesifik memuat kiprahnya dalam perpolitikan nasional dan memimpin NU. Selain itu, ada Ahmad Muhajir yang juga menulis buku berjudul *Idham Chalid: Guru Politik Orang NU.*[14] Buku ini memuat biografi, perjuangan, serta prinsip-prinsip kepemimpinan Idham Chalid dalam memimpin NU sekian lama. Kedua buku tersebut sebagai referensi primer penelitian ini, mengingat pandangan-pandangan Idham Chalid perihal keagamaan dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara

---

[13] Arief Mudatsir Mandan (editor), *Napak Tilas Perjuangan Idham Chalid: Tanggungjawab Politik NU dalam Sejarah,* (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu. Cet. I, 2008)
[14] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid: Guru Politik Orang NU,* (Yogyakarta: LKIS. Cet. I, 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termuat dalam kedua buku tersebut. Selain itu, salah satu buku yang tak kalah penting adalah karya Greg Fealy yang berjudul *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967.*[15] Sungguhpun tidak membahas secara spesifik kiprah Idham Chalid, namun periodesasi kiprah NU dalam buku ini pantas diperhatikan, sebab dalam periode itulah Idham Chalid memimpin NU.

Sedangkan karya yang membahas tentang Demokrasi Terpimpin di antaranya adalah, karya Indonesianis Herbert Feith yang berjudul *Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin.*[16] Buku ini memuat kiprah Soekarno dalam mewujudkan gagasan Demokrasi Terpimpin serta ketegangan-ketegangan yang terjadi antara Soekarno dengan militer. Ada pula karya Ahmad Syafii Maarif yang berjudul *Islam Dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin.*[17] Buku ini memuat sudut pandang seorang akademisi berlatar belakang Modernis dalam memandang kebijakan Soekarno dalam mewujudkan gagasannya, serta kiprah politisi muslim pada saat Demokrasi Terpimpin berlangsung.

Buku-buku di atas secara umum dapat menjadi perbandingan dengan apa yang nantinya penulis lakukan dalam penelitian ini. Secara khusus penulis memfokuskan pada kajian terhadap pandangan Idham Chalid tentang Demokrasi

---

[15] Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKIS. Cet. II, 2003)

[16] Herbert Feith, *Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Cet. I, 1995)

[17] Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin,* Cet II (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terpimpin. Dan karya-karya di atas bisa menyumbang perspektif mengenai kajian yang ingin penulis lakukan.

Melihat berbagai bahan pustaka di atas, pembahasan yang secara khusus mengkaji gagasan Nasionalisme Idham Chalid dalam konteks *Fiqh Siyāsah* sebagai bidang kajian politik Islam belum ada. Maka dari itu, penulis dalam skripsi kali ini akan fokus pada pemikiran Idham Chalid tentang Demokrasi Terpimpin yang ditinjau dengan menggunakan kerangka *Fiqh Siyāsah.*

E. Tujuan Penelitian.

Menyesuaikan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latarbelakang pemikiran Idham Chalid tentang Demokrasi Terpimpin dalam konteks *Fiqh Siyāsah.*
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyāsah* tentang pemikiran Idham Chalid mengenai Demokrasi Terpimpin

F. Kegunaan Hasil Penelitian.

1. Secara teoritis
   a. Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang *Fiqh Siyāsah* terkait tema demokrasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mengenalkan pemikiran Idham Chalid sebagai tokoh yang telah memberikan kontribusi keilmuan khususnya bidang politik kenegaraan.

c. Mengkaji kembali pemikiran Idham Chalid dalam perjuangannya mewujudkan politik yang berbasis nilai Sunni ala Islam Indonesia.

2. Secara praktis: Sebagai bahan bacaan dan referensi para peneliti berikutnya terkait ide-ide Idham Chalid.

G. Definisi Operasional

1. Pandangan Idham Chalid: Pengetahuan, ide, serta pemahaman Idham Chalid yang berkaitan dengan sesuatu hal, yang dalam penelitian ini dimaknai sebagai ide atau pemikiran Idham Chalid mengenai Demokrasi Terpimpin.
2. Demokrasi Terpimpin: *Guided Democracy* yang menjadi eksperimentasi politik dari Soekarno sejak 1957. Demokrasi ini menjadi pengganti dari Demokrasi Parlementer. Demokrasi Terpimpin berarti dalam proses demokratisasi harus ada pemimpin kunci yang mengawal proses demokratisasi tersebut. Pemimpin di sini berarti Soekarno.[18]
3. *Fiqh Siyāsah*: Ilmu Fiqh yang khusus membahas tentang kemaslahatan umat manusia sesuai syara'.[19]

---

[18] Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi,* cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 12

[19] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah,* (Bandung: Prenada Media. Cet. I, 2003), 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Kerangka Teori

Untuk memahami pemikiran Idham Chalid tentang Demokrasi Terpimpin dalam konteks *Fiqh Siyāsah* diperlukan sebuah teori yang representatif sebagai acuan penelitian agar pembahasan lebih mengarah. Mengingat bahwa *Fiqh Siyāsah* adalah bagian dari kajian keIslaman, maka dalam hal ini penulis mendasarkan kepada teori *Tawassuṭ*.[20] *Tawassuṭ* berarti "tengah-tengah". Kosakata ini erat kaitannya dengan *I'tidāl* dan keduanya ini memiliki makna agar bersikap tengah yang berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. NU dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersikap membangunserta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *taṭarruf* alias ekstrem. Selain *Tawassuṭ* dan *I'tidāl,* sikap lainnya adalah *Tasāmuh* (toleran), *Tawāzun* (seimbang), dan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar.*

Salah satu poin sikap kemasyarakatan NU ini penulis gunakan sebagai landasan teoritik karena sikap ini mencerminkan prinsip, dan tatanilai yang berkembang dalam tubuh NU sejak berdirinya hingga sekarang, termasuk saat NU dipimpin oleh Idham Chalid saat melibatkan diri dalam demokrasi terpimpin.

Dalam hal perpolitikan nasional yang cenderung panas saat itu, Idham Chalid menggunakan prinsip ini dengan tujuan agar NU tak terjerumus sikap ekstrem. Tidak ekstrem "kanan" seperti Masyumi yang menjadi oposisi dan

[20] KH. A. Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, cet. IV (Surabaya, Khalista, 2006), 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolak keras gagasan Soekarno, serta tak ekstrem "kiri" seperti PKI yang terlalu "menjilat" Soekarno. Dengan menggunakan teori inilah nantinya penulis akan memotret serta menganalisi pemikiran Idham Chalid tentang Demokrasi terpimpin serta menguak motif-motif politis bergabungnya NU dalam konsepsi Demokrasi Terpimpin. Penulis memahami bahwa teori-teori tersebut yang paling relevan dengan kajian dalam studi kali ini.

I. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Skripsi ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*bibliography).* Penelitian kepustakaan ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[21] Adapun penelitian ini adalah bersifat historis-faktual,[22] karena meneliti tentang tokoh dan pemikirannya, serta deskriptif-analisis [23] yaitu dengan memberi gambaran utuh dan sistematis dalam mengungkap pemikiran Idham Chalid tentang Demokrasi Terpimpin kemudian dianalisis berdasarkan perspektif *Fiqh Siyāsah* secara seksama sehingga dapat menemukan model pemahaman yang utuh dari pemikir yang dikaji.

---

[21] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. III, 2004), 3

[22] Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat*, 136

[23] Lexy J. Moleong . *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Rosdakarya, Cet. VII, 2002), 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang Dikumpulkan

a. Biografi Idham Chalid, latar belakang pendidikan dan keilmuannya, serta *setting* sosial politik yang melingkupi pada masanya.

b. Pemikiran Idham Chalid tentang agama, konsep politik kenegaraan, baik hasil karyanya maupun kajian orang lain terhadap pemikirannya.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

1.Idham Chalid, *Islam dan Demokrasi Terpimpin,* Jakarta: Endang-Pemuda, 1965

2. Idham Chalid, *Mendajung Dalam Taufan*, Jakarta: Endang Api Islam, 1966

b. Sumber Sekunder

1. Arief Mudatsir Mandan (editor), *Napak Tilas Perjuangan Idham Chalid : Tanggungjawab Politik NU dalam Sejarah,* Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2008

2. Ahmad Muhajir, *Idham Chalid: Guru Politik Orang NU,* Yogyakarta: LKIS, 2007.

3. Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967,* Yogyakarta: LKIS, 2003

4. Herbert Feith, *Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin,* Cet II. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
6. Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi,* cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
7. Choirul Anam, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan NU,* Sala: Jatayu, 1985
8. Nur Kholik Ridwan, *NU & Bangsa 1914-1926: Pergulatan Politik dan Kekuasaan,* Yogyakarta: Arruz Press, 2010
9. M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik,* Jakarta : Gramedia, 1994
10. Soebagio IN. *KH. Masjkur: Sebuah Otobiografi*, Jakarta: Gunung Agung, 1984
11. Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru,* Yogyakarta: LKIS, 1999
12. Andree Feillard, *NU vis a vis Negara,* Yogyakarta: LKIS, 2004

4. Teknik Pengumpulan Data.

Berdasarkan sumber-sumber yang ada, baik sumber primer maupun sumber sekunder, penulis berusaha membaca dan menganalisis pemikiran Idham Chalid yang sesuai dengan tema skripsi. Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis melakukan pembacaan teks serta melakukan catatan penelitian. Teknik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode antara lain:

a. *Reading*, yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkenaan dengan tema penelitian. Dalam hal ini, penulis membaca dan mempelajari naskah yang ditulis oleh Idham Chalid, maupun yang ditulis oleh orang lain tentang pemikiran Idham Chalid, khususnya di bidang pemikiran tentang Demokrasi Terpimpin.

b. *Writing,* yaitu mencatat data yang berkenaan dengan penelitian. Di sini, penulis mencatat data-data penting yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

c. *Editing,* yaitu pemeriksaan data secara cermat dari kelengkapan referensi, arti dan makna, istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan dan semua catatan data yang telah dihimpun. Misalnya, penulis mengkroscek kiprah NU di zaman Demokrasi Terpimpin yang ditulis oleh oara pengamat, dengan apa yang ditulis secaralangsung oleh KH. Idham Chalid.

d. Untuk semua data yang dibutuhkan agar terkumpul, maka dilakukan analisis data yang bersifat kualitatif yang bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data.[24] Setelah data terkumpul, maka proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai

[24] J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber.[25] Karena penelitian ini memiliki referensi primer dan sekunder, maka keseluruhan data yang terkumpul, baik tentang demokrasi terpimpin, konstelasi politik era Orde Lama, kiprah NU, serta pemikiran-pemikiran Idham Chalid beberapa aspek pemikiran kenegaraan, khususnya tentang Demokrasi Terpimpin, dianalisis dan dibuat penjabaran secara deduktif.

5. Analisis Data.

Untuk mengetahui dan memahami konsep Idham Chalid, penulis menganalisis data dengan menggunakan instrumen analisis Induktif. Induktif adalah langkah analisis data dengan cara menguraikan data yang bersifat khusus lalu ditarik ke wilayah umum. Sedangkan *Descriptic analysis* adalah sebuah metode penelitian yang digunakan melalui pemaknaan kata atau pesan yang terdapat dalam dokumen. *Descriptic analysis* digunakan untuk mempertajam maksud dan inti data sehingga secara langsung memberikan ringkasan padat tentang fokus utama konsep pemikiran Idham Chalid, analisis ini amat penting untuk memberikan rambu-rambu agar uraian yang ditulis dalam penelitian ini tidak jauh menyimpang dari inti pembicaraan.[26] Dalam pembacaan teks *(text reading)* yang ditulis oleh Idham Chalid maupun hasil "pembacaan" orang lain terhadapnya, penulis tidak begitu saja menyerap

---

[25] *Ibid.*, 193

[26] Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Raka Sarasin, cet. I, 2000), 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua informasi "pengetahuan", namun berusaha mengkritisi agar diperoleh hasil yang maksimal.[27]

J. Sistematika Pembahasan.

Agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian maka diperlukan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah:

Bab Pertama : Pendahuluan yang meliputi latarbelakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kerangka teori, metode penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Latarbelakang kehidupan Idham Chalid

Bab Ketiga : Pemikiran Idham Chalid tentang Demokrasi Terpimpin

Bab Keempat : Analisis Pemikiran Idham Chalid tentang Demokrasi Terpimpin dalam perspektif *Fiqh Siyāsah.*

Bab Kelima : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

[27] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan.* 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

BIOGRAFI KH. IDHAM CHALID

A. Latarbelakang Pendidikan

Sebagai salah seorang tokoh besar yang memiliki andil dalam perpolitikan Indonesia, sosok KH. Idham Chalid dikenal sebagai seorang politisi yang cerdik dan mampu mengarungi berbagai zaman. Baginya, berpolitik semestinya berorientasi kepada kemaslahatan, dan berguna bagi orang banyak, dan karenanya tidak mesti *ngotot-ngototan* atau kaku dalam bersikap. Sikapnya ini dipangaruhi oleh KH. A Wahab Hasbullah, Rais Aam yang sempat berduct dengannya. Ia menggambarkan, seorang politisi yang baik mestilah memahami "filosofi air".

Air apabila dimasukkan pada sebuah gelas maka ia akan berbentuk gelas, bila dimasukkan ke dalam ember akan berbentuk ember. Apabila dibelah dengan benda tajam, ia akan terputus sesaat dan cepat kembali ke bentuk asalnya dan air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Apabila disumbat dan dibendung ia bisa bertahan, bergerak elastis mencari resapan. Bila dibuatkan kanal dia mampu menghasilkan tenaga penggerak turbin listrik serta mampu mengairi sawah dan tanaman sehingga berguna bagi kehidupan makhluk di dunia. Pendapatnya ini didasarkan pada QS. al-Anbiya' ayat 30. [1]

Dengan filosofi air itulah ia tahan di segala "cuaca". Pria berpembawaan kalem ini memulai karir politik dari anggota DPRD Kalsel. Lalu pernah menjadi

[1] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid: Guru Politik Orang NU,* (Yogyakarta: LKIS, 2007), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakil Perdana Menteri pada era pemerintahan Soekarno, Menteri Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Sosial pada era pemerintahan Soeharto dan mantan Ketua DPR/MPR. Idham juga pernah menjadi Ketua Partai Masyumi, Pendiri/ Ketua Partai Nahdlatul Ulama dan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Peranan inilah yang membuatnya dikenal sebagai politisi tangguh.[2]

Idham dilahirkan di Setui, (dekat wilayah Kota Baru, di bagian tenggara Kalimantan) Kalimantan Selatan, pada 27 Agustus 1922.[3] Ayahnya orang Amuntai dan ibunya orang Setui, dan inilah yang menjadi alasan mengapa Idham lahir di Setui. Ayahnya bernama H. Muhammad Chalid, seorang penghulu (pemuka agama yang berwenang untuk mengawinkan orang). Ia memiliki empat saudara kandung dalam keluarga, dua laki-laki dan dua adik perempuan.

Di Amuntai Idham menghabiskan masa kecilnya. Ia adalah seorang anak yang cerdas dan berbakat. Idham langsung ditempatkan di kelas II ketika mendaftar masuk ke Sekolah Rakyat (SR) Amuntai. Selain itu, kemampuannya berpidato sudah mulai kelihatan sejak Idham bersekolah di SR. Pada tahun 1935, ia menamatkan pendidikan dasarnya. Idham kemudian melanjutkan pendidikannya di *Madrasah al Rasyidiyyah* (dulunya bernama *Arabisch School*), sebuah lembaga pendidikan agama

---

[2] Arief Mudatsir Mandan, *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid; Tanggungjwab Politik NU dalam Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2008), ix.

[3] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid*, 19. Terdapat perbedaan tentang tanggal lahir KH. Idham Chalid. Arief Mudatsir Mandan dalam *Napak Tilas* serta Ahmad Muhajir berpendapat bahwa KH. Idham Chalid lahir ada tanggal tersebut. Berbeda dengan yang dimuat *Tempo*, KH. Idham Chalid disebutkan lahir 5 Januari 1921. Lih. Tim Penulis Tempo, *Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indoneasia 1981-1982*, (Jakarta: Graffiti, 1981), 99. Pendapat Tempo ini juga sama dengan catatan Mohammad Subhan dalam *Antologi NU : Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*, (Surabaya: Khalista, 2007), pada halaman 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. Didirikan oleh Tuan Guru H. Abdurrasyid pada tahun 1922. Beliau merupakan lulusan universitas Al-Azhar yang saat itu terkenal sebagai pusat studi agama Islam. Lembaga ini awalnya hanya pengajian yang dilangsungkan di rumah dengan sistim *halaqah* (para santri duduk di sekeliling guru sambil mengikuti pelajaran). Sekolah ini merupakan alternatif bagi sekolah yang didirikan Belanda.

Tepat pada tahun 1938, bersama beberapa temannya, ia berangkat ke Pondok Modern Gontor di Ponorogo. Selama lima tahun menimba ilmu di sana Idham menyelesaikan pendidikannya di sana. Tiga tahun di *Kulliyah al Mu'allimin al Islamiyah* (pendidikan guru agama Islam) dan sisanya di tingkat *Kweekschool Islam Bovenbouw.*[4] Hal ini kembali menunjukkan kecerdasannya karena lazimnya hingga tingkat tersebut seorang santri harus menghabiskan waktu 7 hingga 8 tahun. Tahun 1943 Idham meneruskan pendidikannya ke Jakarta dan setahun kemudian menjadi guru di Gontor, sekaligus menjabat wakil direktur di sana.[5]

Selain menguasai bahasa Belanda, Arab dan Inggris, Idham juga menguasai bahasa Jepang.[6] Bahasa ini ia pelajari sejak Jepang menginjakkan kakinya di Indonesia. Pihak Jepang yang sangat senang ada anak muda pribumi yang menguasai "bahasa ibu" mereka bahkan sempat mengundangnya untuk berkunjung ke negeri Matahari Terbit tersebut.[7]

---

[4] Idham Chalid, *Mendajung dalam Taufan,* (Jakarta: Endang-Api Islam, 1966), 133.
[5] Arief Mudatsir Mandan, *Napak Tilas,* 96.
[6] *Ibid.*
[7] Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-Orang dari Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 373-374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 1945 Idham kembali ke Kalimantan Selatan dan tak berapa lama kemudian diminta menjadi Kepala di sekolahnya dulu, Madrasatur Rasyidiyyah. Sekolah tersebut mengalami kekosongan pimpinan dalam rentang waktu hampir satu tahun, sejak 1944, terkait dengan semakin ketatnya pengawasan dari pihak Jepang. Kedatangannya ke almamaternya ini membawa semangat perubahan. Oleh Idham, nama sekolah dirubah dengan nama baru – Normal Islam Amuntai. Normal berasal dari bahasa Belanda (Noormaal) yang berarti sekolah lanjutan. Perubahan nama ini seiring dengan perubahan sistim pengajaran dan pendidikan yang disesuaikan dengan yang diikuti Idham di PM Gontor. Sebagian dari guru-guru yang mengajar di Gontor berasal dari Normal Islam Padang yang sudah terkenal saat itu. Perubahan terutama pada penambahan mata pelajaran ilmu-ilmu eksakta dan pengetahuan umum di samping ilmu-ilmu agama beserta penunjangnya (Ilmu Alat). Perbandingannya adalah 60 % pelajaran agama dan 40 % pelajaran umum. Sebagai catatan, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa pengantar.[8]

Kecenderungan aktifisnya dan kemampuannya mengorganisir massa terlihat ketika ia bersama teman-temannya mendirikan *Ittihad al Ma'ahid al Islamiyyah* (IMI) atau Ikatan Sekolah-sekolah Islam. Sebagaimana telah disebutkan, ada kecenderungan untuk mendirikan perguruan-perguruan agama dalam masyarakat di Amuntai. Terdorong oleh komitmen terhadap pendidikan Islam Idham dan beberapa temannya mendirikan IMI dengan tujuan mempersatukan dan membangun kerja

---

[8] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid*, 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama di antara perguruan-perguruan Islam. Ada tujuh perguruan yang saat itu bergabung dalam IMI. Idham Chalid pun diangkat menjadi Ketua Umumnya dan Normal Islam sebagai pusat segala kegiatan.[9]

Minatnya yang tinggi di bidang keorganisasian membuatnya mudah berkecimpung di dunia pergerakan. Pada tahun 1945 Idham menjadi anggota Persatuan Rakyat Indonesia (PRI) yang bertempat di Banjarmasin.[10] PRI adalah partai politik pertama yang didirikan di Kalimantan atas anjuran pemerintah Jepang. Setahun kemudian Idham bergabung di Serikat Muslimin Indonesia (Sermi) dan duduk sebagai Anggota Pengurus Besar dan Komisaris Daerah Hulu Sungai Utara dan Selatan. Sermi juga merupakan organisasi politik dari kalangan masyarakat muslim setempat dengan tujuan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sesuai cita-cita proklamasi. Pada tahun 1947 Idham bergabung dengan Sentraal Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimatan (SOPIK), sebuah organisasi bawah tanah yang melakukan perang gerilya melawan Belanda. Pemimpinnya adalah seorang yang pernah berguru padanya, Brigjen Hassan Basry.[11] Hassan Basry sebelumnya adalah pemimpin Lasykar Saifullah. Organisasi ini kemudian dilebur menjadi ALRI DIVISI IV.[12] Di sini Idham menjadi Penasehat Staf Umum. Keterlibatannya di SOPIK menyebabkan dia ditangkap dan ditahan tentara NICA pada 27 Maret 1949 dengan tuduhan menjadi penasehat, pelatih, dan mendalangi

---

[9] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid*, 31.
[10] Arief Mudatsir Mandan, *Napak Tilas*,141.
[11] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid*, 35.
[12] Arief Mudatsir Mandan, *Napak Tilas*, 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerilya. Setelah dibebaskan, ia kemudian menjadi anggota Parlemen Sementara Negara Kesatuan sampai tahun 1955 mewakili Kalimantan.[13]

B. Karir Politik

Kecemerlangan karier organisasinya membuatnya dilirik partai Masyumi. Idham diangkat menjadi anggota Parlemen Sementara (DPRS) 1950 mewakili Masyumi.[14] Ketika NU memisahkan diri dari Masyumi, Idham memilih terlibat di NU dan aktif dalam melakukan konsolidasi ke dalam, antara lain dengan menjadi anggota Majelis Pertimbangan Politik PBNU yang pada garis besarnya bertugas mengikuti perkembangan politik di tanah air, membuat analisa dan menyimpulkannya untuk diserahkan kepada PBNU, sebagai suatu saran atau usul. Majelis ini dibentuk pada 2-3 September 1951.[15]

Pada awal 1950-an Idham sering menemani Wahab Chasbullah, Rais 'Aam PBNU yang sangat besar pengaruhnya dalam berpisahnya NU dari Masyumi, mengikuti "safari" rutin ke cabang-cabang NU. [16] Kedekatan dengan Wahab inilah yang antara lain membuatnya bertahan lama sebagai Ketua Umum.

---

[13] *Ibid.*

[14] Martin van Bruinessen. *NU, Tradisi, relasi-relasi Kuasa, pencarian Wacana Baru,* (Yogyakarta : LKIS, 1994), 231

[15] Saifuddin Zuhri, *Berangkat dari Pesantren* (Jakarta: Gunung Agung, 1987), 397.

[16] Greg Fealy, "Wahab Chasbullah, Tradisionalisme dan Perkembangan Politik NU" dalam Greg Fealy dan Greg Barto (Ed), *Tradisionalisme Radikal. Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1997), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Idham Chalid memulai kariernya di Jakarta dengan aktif di gerakan Pemuda Ansor,[17] kemudian sebagai ketua PB Ma'arif, organisasi yang berafiliasi kepada NU dengan konsentrasi pada penanganan masalah pendidikan, pada tahun 1952.[18] Pada tahun yang sama ia diangkat PBNU menjadi Sekretaris Jendral partai dan dua tahun kemudian, terpilih sebagai Wakil Ketua. Selama masa kampanye Pemilu 1955 ia memegang jabatan penting sebagai Ketua Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama (Lapunu).[19]

Pemilu 1955 adalah ujian pertama bagi NU yang pada tahun 1952 keluar dari Masyumi dan mendirikan partai politik sendiri. Dengan demikian Ketua Lapunu memiliki tugas penting bagi partai di kancah politik selanjutnya. Dan terpilihnya Idham menjadi anggota DPR pada Pemilu 1955 dengan tiket NU adalah konsekuensi logis belaka.

Dalam pemilu yang pertama kali diselenggarakan ini NU meraih keberhasilan yang mengejutkan, bahkan bagi pihak NU sendiri. Dari hanya delapan kursi Parlemen yang dimiliki, NU berhasil mencapai prestasi sebagai empat besar, dengan 45 kursi. Total suara yang dikumpulkan NU pada Pemilu 1955 sebesar 6.955.141

---

[17] Tim Penulis Tempo, *Apa dan Siapa,* 99.

[18] Bibit Suprapto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat hidup, Karya, dan Sejarah perjuangan 157 Ulama Nusantara* ,(Jakarta: Gelagar Media Indonesia), 400.

[19] Lapunu (Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama), sebuah dewan khusus yang menangani pemilu bagi partai NU yang dibentuk bulai Mei 1953. Lapunu bertanggung jawab menangani segala permasalahan yang berhubungan dengan pemilu, termasuk pengaturan logistik, pelatihan juru kampanye, perumusan strategi, penyusunan dan pemeriksaan (*Screening*) daftar para calon, pengumpulan dana, hubungan dengan pejabat yang berwenang, dan mengumpulkan hasil pemungutan suara. Struktur Lapunu menyerupai NU, dengan dewan pengurus dari tingkat nasional hingga cabang-cabang NU di daerah. Mohammad Subhan, *Antologi NU I,* 74-75. Sebelum dijabat Idham tahun 1954. posisi ketua ditempati oleh Saleh Surjaningprojdo. Lihat, Greg Fealy, *Ijtihad,* 186-187 dan 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(18,4 %) dari total suara pemilih sebesar 37.785.299. Dari perolehan suara yang besar ini, nampaknya ada tiga pilar utama yang menyangga kekuatan NU yaitu ulama, pesantren, dan politisi memegang peranan penting dalam keberhasilan NU menjalani pemilihan umum itu.[20] Ali Haidar menambahkan bahwa faktor utama keberhasilan NU pada Pemilu ini adalah tema dan metode kampanye yang digunakan NU terbukti sangat efektif.[21]

Dengan peningkatan jumlah kursi di Parlemen, pengaruh NU menjadi semakin besar dalam pembentukan Kabinet. Pada 1956 lima Menteri menjadi jatah NU dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo II, termasuk Wakil Perdana Menteri yang diserahkan pada Idham. Fealy menilai naiknya Idham Chalid ke jabatan Wakil Perdana Menteri merupakan hal yang luar biasa. Dengan usianya yang baru 35 tahun[22] dan tanpa pengalaman sebagai menteri, pengangkatannya mencerminkan bahwa NU tidak hanya menaruh harapan besar terhadap perkembangan karir Idham, tetapi juga tidak mempunyai calon lain yang layak.

Karir politik Idham semakin meningkat tatkala ia terpilih sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar NU ke-21 yang diselenggarakan di Ibukota Sumatera Utara, Medan, di bulan Desember tahun 1956. Ia dengan telak mengungguli Mohammad Dachlan yang telah memegang jabatan tersebut sejak April 1953.

---

[20] Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1986), 33; dan Mahrus Irsyam, *Ulama dan Politik, Upaya Mengatasi Krisis* (Jakarta: Yayasan Pengkhidmatan, 1984), 83-131, dikutip dari Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustataka Utama, 1998), 170.

[21] Lebih lanjut tentang tema dan metode kampanye NU lih. Ali Haidar, *Ibid.*, 170-174 ; Greg Fealy, *Ijtihad*, 187-192 ; juga Saifuddin Zuhri, *Berangkat*, 432-433.

[22] Dikutip dari Greg Fealy, *Ijtihad*, 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pesatnya perkembangan karirnya sangat mengagumkan mengingat bahwa, berbeda dengan para pengurus PBNU lainnya, ia bukan orang Jawa dan merupakan lulusan Pesantren Modern Gontor di Ponorogo, lembaga yang tidak punya kaitan dengan NU dan oleh banyak ulama banyak dipandang sebagai tulang punggung modernisme Islam.[23] Jabatan ini terus dipertahankannya hingga diminta mundur pada tahun 1982 oleh para kiai.[24] Secara keseluruhan, Idham Chalid memimpin NU selama delapan periode dalam waktu hampir tiga dekade.[25]

Jaringan eskternalnya yang luas di pusat pemerintahan membuatnya masuk dalam struktur kenegaraan. Tepat sebulan sesudah Soekarno mengumumkan Dekrit, pada bulan Agustus, Idham diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Badan ini berfungsi memberikan pertimbangan kepada Presiden dan Pemerintah, dan pada saat itu nampak lebih berpengaruh dari pada parlemen. Oleh van Bruinessen pengangkatan Idham menjadi anggota DPAS ini adalah karena kedekatannya dengan Soekarno, sebagaimana mayoritas tokoh-tokoh NU lainnya.

---

[23] *Ibid.*, 231.

[24] Secara kritis hal ini dibahas dalam Martin van Bruinessen, *NU*, terutama halaman 115-149.

[25] Sementara Idham, sejak diangkat menjadi Ketua Umum PBNU telah mengubah jalur administrasi kepengurusan dengan menjadikan rumahnya sebagai kantor. Dengan kata lain, Idham mengendalikan NU dari rumahnya. Ia bukan orang yang secara ketat menjalankan aturan-aturan organisasi layaknya Dachlan (Ketua Tanfidziyyah sebelumnya), melainkan suka memberi bantuan kepada siapapun yang datang, baik berupa materi, nasehat atau rekomendasi. Dengan sifat yang ringan tangan dan menggunakan kedudukannya untuk menolong siapa saja, ia membuat jaring-jaring patronase yang sangat berguna baginya karena banyak yang merasa berhutang padanya secara pribadi, bukan kepada NU. Kharismanya membuat orang yang berhubungan dengannya merasa nyaman dan ia mendapat julukan ahli *yahannu*, istilah sehari-hari di kalangan pesantren yang berarti 'mengatakan hal-hal yang menyenangkan orang, menyampaikan apa yang ingin mereka dengar'. Gaya kepemimpinan seperti inilah yang membuatnya bertahan lama di jajaran teratas *tanfidziyyah* (eksekutif) NU. Lihat Greg Fealy, *Ijtihad*, 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Idham bahkan menjadi pembela blak-blakan dari manifesto ideologis nasionalistik populis Soekarno, *Manipol Usdek.* Selanjutnya di tahun 1960, Idham menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara,[26] yang antara lain tugasnya membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam sejarahnya, penyusunan GBHN ini didasarkan pada pidato-pidato Presiden Soekarno, yaitu pidato pada 17 Agustus 1959 atau yang biasa disebut Manifesto Politik, pidato di depan Dewan Perancang Nasional pada 28 Agustus 1959, pidato 17 Agustus 1960 dan pidato di depan Sidang Umum PBB pada 30 September 1960. MPRS setelah membahas keempat pidato tersebut kemudian memperkuatnya dan meresmikannya menjadi GBHN. Hal ini antara lain karena belum ada preseden tentang bagaimana pembentukan GBHN dan dari mana saja bahan-bahannya dicari. Perlu dicatat bahwa MPRS tidak mempunyai staf ahli yang dapat dimintai bantuannya. Posisi Wakil Perdana Menteri Kedua kembali dijabat Idham pada tahun 1966 dalam jajaran Kabinet Dwikora hasil *reshuffle*, walaupun dalam jangka waktu yang sangat pendek-hanya empat bulan. Jabatan ini pula yang terakhir didudukinya di masa Orde Lama.[27]

Meskipun Orde Lama sudah runtuh, karier politik Idham tetap bertahan di puncak. Dia tetap dianggap penting oleh pemerintah Orde Baru hingga dua kali menjabat dalam Kabinet. Pada kabinet Orde Baru yang pertama Idham diangkat

---

[26] Bibit Suprapto, *Ensiklopedi* 400.
[27] Dikutip dari Greg Fealy, "Lampiran 1: Menteri NU, 1957-1967" dalam *Ijtihad.*, 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi Menteri Kesejahteraan Rakyat dalam kurun waktu 1967 hingga 1970. Kemudian dia menduduki posisi Menteri Sosial di tahun 1970 sampai 1971.[28]

Pemilu pertama di masa Orde Baru dilangsungkan pada tahun 1971. Pemilu ini merupakan yang kedua sekaligus yang terakhir bagi partai Nahdlatul Ulama karena Pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan penyederhanaan partai yang lebih ekstrim dari yang dilakukan Soekarno. Kebijakan tersebut ditempuh melalui fusi atau penggabungan beberapa partai yang memiliki kedekatan atau kesamaan ideologi. Hal ini dilakukan oleh Orde Baru sebagai bagian dari programnya menata kehidupan berpolitik. Demikianlah, NU akhirnya bergabung ke dalam Partai Persatuan Pembangunan di tahun 1973.[29]

Idham dipilih menjadi Ketua DPR dan MPR sesudah Pemilu 1971 dalam masa bhakti 1971-1977. Jabatan terakhir yang dipegangnya adalah sebagai Ketua DPA.[30] Jabatan ini tidak lagi punya pengaruh besar dalam kehidupan bernegara, dan sering dianggap posisi kehormatan bagi para pejabat tinggi atau tokoh politik sebelum dipensiunkan.

Tokoh penyelenggara Konferensi Internasional Asia Afrika (KIAA) pada 1965 ini sebagaimana tokoh NU lainnya memang kurang terampil dalam dunia tulis menulis. Tampaknya ia lebih mahir berpidato.[31] Walaupun Idham bukan seorang penulis produktif dan kemampuan menulisnya tidak sebaik performanya ketika

---

[28] Martin van Bruinessen, *NU*, 291.
[29] *Ibid.*, 101.
[30] *Ibid.*, 291
[31] Bibit Suprapto, *Ensiklopedi*, 402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpidato, tidak berarti tidak ada karya yang dihasilkannya. Idham, terutama, menulis untuk Duta Masjarakat, sebuah koran milik Nahdatul Ulama. Satu artikel yang cukup penting berkaitan dengan aktifitas dan pemikirannya di masa Demokrasi Terpimpin berjudul "Haluan Politik" yang diterbitkan tahun 1965 oleh majalah "Api Islam".

Sewaktu masih aktif di pergerakan kemerdekaan di Kalimantan, Idham menghasilkan sebuah naskah yang akhirnya diterbitkan sewaktu ia dipenjara pada tahun 1949. Judulnya "Bertamasya ke Cakrawala", dan diterbitkan atas kerja sama dengan Haspan Hadna, Pemimpin redaksi "Indonesia Berjuang".[32]

Sebuah karya tentang Parlemen yang disusun sewaktu ia menjadi anggota DPRS mewakili Kalimantan. Diterbitkan tahun 1951 dan menjadi semacam buku panduan memahami apa itu parlemen dan bagaimana fungsinya dalam kehidupan bernegara. Tentu saja parlemen yang dimaksud adalah parlemen di alam demokrasi liberal, yakni saat partai-partai begitu berkuasa. Idham tidak cuma membicarakan hal-hal teknis di sini, tapi juga ada tinjauan historis dan pengalaman negara-negara lain dalam menjalankan Demokrasi. Buku tersebut berjudul "Parlemen, Organisasi dan Tjara Bekerdjanja" dengan Astanabuku Abede-Semarang sebagai penerbitnya.

Ada pula *booklet* yang berjudul "Islam dan Demokrasi Terpimpin" yang ditulis oleh Idham Chalid sebagai bahan-bahan kuliah yang disampaikannya di Perguruan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama Surakarta. Diterbitkan di Jakarta oleh

---

[32] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid,* 48-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Endang-Pemuda di 1965. Buku ini menyiratkan pemikirannya dan usahanya memahami Demokrasi (Terpimpin) dari perspektif agama.

Buku lainnya berjudul "Mendayung dalam Taufan" yang berisi beberapa pidato di berbagai pertemuan resmi seperti muktamar dan pernyataan sikap NU. Buku ini bagian dari dokumentasi resmi NU di masa-masa menjelang dan berlakunya Demokrasi Terpimpin. Diterbitkan tahun1966 oleh penerbit Jakarta : Endang-Api Islam.

Idham Chalid juga memperoleh beberapa penghargaan terkait dengan aktifitasnya, yakni Bintang Gerilya dari Presiden Soekarno tahun 1956 atas perjuangannya bersama-sama dengan kaum gerilyawan di Kalimantan; Bintang Vendera Yugoslavia dari Presiden Tito di tahun 1958; Bintang R. P. A. el Gumhuriyjah Tingkat I tahun 1959; dan Bintang Maha Putra dari Presiden Soekarno di tahun 1960.[33]

Di bidang akademis ia mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al Azhar Mesir, dalam Pengetahuan Islam dan Perdjuangan Islam pada tahun 1959, dan menjadi Ketua Dewan Kurator Institut Agama Islam Negeri tahun 1960.[34]

Di NU, posisinya sebagai ketua umum berakhir pada 1984. Pada 1984, posisi dia digantikan oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang ditandai dengan fase

---

[33] *kabarhaji.com/.../kh-idham-chalid-kiprah-ulama-dan-politisi-handal-nusantara. Diakses pada 30 Mei 2011.*

[34] Mohammad Subhan, *Antologi NU I*, 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khittah 1926 atau NU kembali menegaskan diri sebagai ormas yang tidak terlibat politik praktis serta tidak berafiliasi terhadap partai mana pun.

Setelah tidak lagi di politik, Idham lebih banyak berkecimpung di dunia tarekat dengan menjadi salah satu pimpinan Jamiyyah Ahil Thariqah al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah, salah satu Badan Otonon NU. Ia juga memimpin Perguruan Darul Ma'arif di Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Lembaga Pendidikan Darul Qur'an, dan Rumah Yatim di Cisarua. Di Cipete kediaman Idham, ratusan santri –anak-anak dhuafa, bahkan di antaranya ada yang telah menjadi pejabat dan menteri– dididik ilmu agama. "Di sini, setiap hari di tengah derai senda gurau para santri, dia terbaring lemah. Tiga bulan setelah tidak berkuasa, Soeharto mengunjungi Idham. Habibie dan Gus Dur semasa menjadi presiden juga mengunjunginya," tulis Asro Kamal Rokan dalam "KH Idham Chalid Kini".[35]

Sejak 1999, Idham terkena serangan jantung. Dia lumpuh total dan tak bisa bicara. Untuk makan pun dia harus dibantu dengan selang yang dimasukkan ke saluran pencernaannya di perut *(sounde).* Pada Minggu, 11 Juli 2010 pukul 08.00 WIB, dia menghembuskan nafas terakhirnya.[36]

---

[35] Asro Kamal Rokan, "KH Idham Chalid Kini", *(Republika, 7/5/2008).*
[36]http://www.majalah-historia.com/majalah/historia/berita-272-politisi-air-yang-tak-lagi-mengalir.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Demokrasi Terpimpin Dalam Pandangan Idham Chalid

Tatkala Soekarno mencanangkan Demokrasi Terpimpin, sikap partai Islam dan umat Islam terpecah. Sebagian mendukung, sebagian lagi menolak, karena cenderung mengarah pada sistem otoritarianisme. Sikap umat Islam memang serba sulit, sebagai salah satu unsur NASAKOM, jika terlibat langsung dalam mekanisme Demokrasi Terpimpin bukan tidak mungkin jika Soekarno akan terus menghegemoni kekuatan umat Islam. Namun, jika tidak bergabung, partai Islam, khususnya NU, khawatir dengan menguatnya pengaruh PKI terhadap Soekarno.

Setelah Dekrit 5 Juli 1959 yang membubarkan Majelis Konstituante dan berlakunya kambali UUD 1945 untuk menggantikan UUDS 1945, Soekarno mengumumkan kabinetnya yang baru, menggantikan Kabinet Djuanda pada 6 Juli. Kabinet Djuanda merupakan kabinet peralihan dari periode Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin. Kabinet baru di bawah payung UUD 1945 ini diberi nama Kabinet Kerja yang bertugas malaksanakan gagasan Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin dan dengan Demokrasi Terpimpin inilah yang melambungkan Soekarno di kancah poltik dengan tidak menjadi suatu simbol Negara lagi. Di saat itupulah umat Islam berbeda pandangan dan terbecah-belah menghadapi sistem yang diciptakan Soekarno.[37]

---

[37] Sosok Idham memang lebih kalem, tetapi sama dahsyatnya dengan Soekarno. Bukannya membangkitkan semangat, tetapi tahu menghadapi emosi massa dan mendatangkan simpati. Ia orang yang diplomatis. Selalu terlihat tenang, dan seringkali membuat orang yang marah menjadi tak berkutik. Fealy mencatat bahwa kepribadian dan gaya kepemimpinan Idham sebagai seseorang yang ahli dalam berkomunikasi, punya banyak lelucon dan sangat pandai membaca suasana hati pendengarnya. Kemampuannya menyenangkan hati dan menggerakkan massa membuatnya menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sikap Masyumi yang menentang Demokrasi Terpimpin, sementara NU, PSII dan Perti bergabung di dalamnya semakin terbatasnya ruang gerak untuk partai kaum modernis ini, apalagi budaya politik yang dikembangkan di Indonesia pada waktu itu adalah budaya politik Otoriter dengan Soekarno, PKI dan pemimpin tertinggi Angkatan Darat sebagai pemain utamanya.[38]

Pada 11 Juli 1957 Soekarno membentuk Dewan Nasional yang menganggap DPR semakin melemah yang kemudian terbentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) pada 22 Juli 1959 di bawah UUD 1945 yang juga diketuai Soekarno, berakhirlah tugas Dewan Nasional. Di sini, Idham menjadi anggotanya. Badan ini berfungsi memberikan pertimbangan kepada Presiden dan Pemerintah, dan pada saat itu tampak lebih berpengaruh daripada parlemen. Idham, menurut Martin Van Bruinessen, diangkat menjadi anggota DPAS karena kedekatannya dengan

---

salah satu pembicara NU yang paling populer. Pidato-pidatonya merupakan perpaduan dari khutbah keagamaan, dongeng, propaganda politik selalu disampaikan dengan cara yang menyejukkan dan penuh kerendahan hati. Kalau mau dianalogkan dengan jurus pesilat: Soekarno menyerang dengan jurus yang keras dan gesit, Idham menyambut serangan dengan jurus lembut tetapi mematikan. Sikap pemimpin NU seperti Idham inilah yang menurut Greg Fealy cocok menghadapti agresifitas Soekarno. Lihat Greg Fealy, *Ijtihad,* 231.

[38] Sikap NU terkesan mengambang. Padahal sikap ini mencerminkan watak akomodatif kelompok ini. Saat itu menolak Soekarno dan Komunis merupakan langkah riskan karena NU tak akan bisa berkontribusi dalam proses kenegaraan, dan lebih dari itu Komunias akan leluasa mempengaruhi Soekarno. Maka mengambil sebagiannya merupakan salah satu keputusan politik yang didasarkan pada prinsip *mā lā yudraku kulluh lā yutraku kulluh* (kewajiban tidak boleh ditinggalkan dengan alas an tidak bisa dilakukan secara utuh). Di kalangan NU, penggunaan prinsip uṣūl fiqh seperti ini merupakan alat penting untuik memberikan legitimasi terhadap suatu keputusan natau tindakan. Lihat, Asep Saiful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: LP3ES, 2004), 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soekarno, sebagaimana tokoh-tokoh NU lainnya, Idham bahkan menjadi pembela manifesto ideologis Soekarno, MANIPOL USDEK.[39]

Sebagai Ketua Umum PBNU, posisi Idham sangat sentral dalam kondisi politik saat itu. Kemampuannya membawa NU menyesuaikan diri dalam iklim Demokrasi Terpimpin, sebagian di antaranya merupakan pengaruh dari sikap dan pandangannya yang luas tentang iklim politik. Dalam sebuah kesempatan tahun 1959, ia mengemukakan pandangannya tentang falsafah politik yang luwes ala Sunni. "Dari sudut pandang politik dalam negeri, Nahdlatul Ulama selalu sedapat mungkin, untuk menyesuaikan diri dengan waktu dan peristiwa yang sedang terjadi dan tidak pernah mengajukan sesuatu yang bersifat absolute dan tanpa syarat."[40]

Dalam kondisi ini, AH. Nasution, perwira AD, mendatangi Idham untuk mengetahui pandangan NU atas Dekrit Presiden. Idham menjawab, "Kami (NU) tidak dapat berkomentar. Itu adalah hak presiden untuk menentukan cara mengamankan Negara."[41]

Sikap PBNU mendukung Demokrasi Terpimpin semakin mengemuka tatkala Muktamar NU ke-22 yang berlangsung pada bulan Desember 1959 di Jakarta, yang menghasilkan duet KH. A. Wahab Chasbullah dan Idham Chalid sebagai Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Para ulama tampak mudah menyesuaikan diri dengan Demokrasi Terpimpin. Hal ini, misalnya tercermin dari pernyataan Kiai Wahab:

---

[39] Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru,* (Yogyakarta: LKIS, 1999), 75.
[40] Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967,* (Yogyakarta: 2009), 73.
[41] KH. Saifuddin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren,* (Jakarta: Gunung Agung, 1987), 452.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Demokrasi memang harus terpimpin, yakni terpimpin oleh norma dan moral. Tanpa kepemimpinan itu akan menjurus pada anarki, baik anarki maupun diktator bertentangan dengan demokrasi itu sendiri."[42]

Idham, sebagai ketua Tanfidziyah, menurut Andree, juga tak memiliki keberatan yang mendasar terhadap Demokrasi Terpimpin.[43] Lebih lanjut Idham mengajukan penjelasan mengenai pandangan Islam tentang demokrasi. Menurutnya, dalam Islam, suara mayoritas sebagainya disertai *"ḥaq"* kebenaran dan *"ahli"*nya. Mendengarkan suara terbanyak semata-mata, tanpa melihat *Ḥaq* dan keahlian, bisa menjerumuskan ke dalam bahaya dan kesesatan.[44] Jadi menurut Idham, demokrasi dalam Islam haruslah:

a. "Mengutamakan musyawarah dalam hal-hal yang tidak ada *naṣ* yang *ṣariḥ* (wahyu dari Allah)
b. Menyaring hasil musyawarah dengan tidak selalu menekankan pada suara yang terbanyak semata-mata.
c. Kepribadian dan keahian (karya) dari orang-orang yang diajak musyawarah merupakan faktor penting, lebih penting dari jumlah orang.[45]

Sebelumnya, PBNU menilai bahwa tujuan partai hanya bisa tercapai melalui kehadiran NU dalam kabinet dan Dewan Nasional, namun mereka sama sekali tidak bermaksud meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi, serta tetap menjaga solidaritas Islam dan menentang Komunisme. Hanya dengan ikut terlibat dalam Kabinet Karya

---

[42] Sebagaimana dikutip oleh Andree Feillard dalam *NU Vis A vis Negara,* (Yogyakarta: LKIS, 2008), 82
[43] *Ibid.*
[44] Saifuddin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren,* 531
[45] Dikutip dari Andree Feillard, *NU vis a vis Negara,* 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Dewan Konstituante, NU akan bisa membatasi perombakan kabinet parlementer dan membendung pengaruh PKI. Dengan absennya Masyumi dan PSII, paling tidak masih ada satu partai besar dalam Demokrasi Terpimpin.[46] PBNU menanggapi kecaman yang menuduh mereka tidak konsisten dengan mengatakan, "seandainya tetap memakai kata penghibur "konsekuen" maka perlahan-lahan kami pasti sudah tertinggal jauh di belakang lawan politik dan ideologis kami."[47]

Sebagai ganti DPR pilihan rakyat yang dibubarkan, pada Maret 1960 Soekarno membentuk DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) yang merupakan mekanisme pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Anggota-anggota yang duduk dalam dewan tersebut adalah mereka yang disukai Soekarno dan bertugas menjalankan politiknya. Demi mewujudkan ambisinya, Soekarno memanggil Idham dari NU, Suwirjo dari PNI, DN. Aidit dari PKI, dan Ruslan Abdulgani (Wakil Ketua DPA) ke Istana presiden di Tampaksiring Bali untuk menentukan struktur DPR-GR. Mereka menyetujui susunan DPR-GR yang beranggotakan 261 orang, 130 dari partai politik, 95 dari golongan fungsional dan 36 wakil militer. Dari jumlah tersebut, NU memiliki 35 kursi di perwakilan partai politik, dan 15 kursi dari perwakilan golongan fungsional. Begitu kembali dari Tampaksiring, Idham langsung mendapatkan kecaman keras atas keputusannya menyetujui susunan kabinet baru yang dianggap telah mengorbankan kepentingan politik Islam yang lebih luas. Para ulama NU

---

[46] Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama...*, 240.
[47] Idham Chalid, *Buku kenang-Kenangan Muktamar NU ke XXII.* 79. Sebagaimana dikutip oleh Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama...*, 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggap bahwa DPR-GR adalah DPR *ghosob* alias merebut hak atau kepemilikan orang lain. Kiai-kiai NU seperti KH. Bisri Syansuri, KH. Achmad Siddiq, KH. Muhammad Dachlan, dan KH. Machrus Ali adalah mereka yang menentang langkah NU bergabung di DPR-GR ini.[48] Sedangkan KH. A. Wahab Chasbullah mendukung penuh langkah NU bergabung dalam DPR-GR ini. Prinsip Kiai Wahab tegas, lebih baik melakukan perbaikan dari dalam, dengan melibatkan NU dalam konsep trisula itu. Begitu pula tatkala terjadi perbedaan pandangan mengenai sikap NU terhadap DPR-Gotong Royong (DPR-GR). Bahkan ia berbeda pendapat dengan iparnya, KH. Bisri Syansuri. "Masuk dulu, kalau tidak cocok baru keluar. kalau di luar saja, kembali masuk akan sulit. Kalau sudah masuk, mudah keluarnya," demikian alasan pengasuh Pesantren Tambakberas ini.[49]

Sikap demikian menyebabkan Kiai Wahab dikecam habis-habisan. Kiai Wahab menganggap NU harus masuk ke dalamnya. Karena dia berpandangan, bagaimana nasib umat Islam kalau perundang-undangan yang ada akan dibuat oleh "orang lain". Sebaliknya Kiai Bisri menganggap, seharusnya DPR adalah hasil dari Pemilu 1955, sedangkan DPR-GR dibentuk Presiden Soekarno. Karena itu, dalam pandangannya, DPR-GR tidak sah dan tidak ada. Padahal Kiai Wahab, sebagai orang pertama NU (Rais Aam), bersedia menerima DPR-GR.[50]

---

[48] M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1998), 165. Lihat juga dalam KH. Saifuddin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren*, 483-484.
[49] Nur Khalik Ridwan, *NU dan Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Arruz, 2010), 149.
[50] KH. Saifuddin Zuhri, *Berangkat...*, 483.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan, dalam Siaran kc VII PBNU yang ditandatangani Ketua Umum Idham Chalid dan Sekjen PBNU Saifuddin Zuhri, tegas dinyatakan bahwa kebijakan PBNU member kesempatan kepada anggota-anggota NU yang ditunjuk kepala Negara duduk dalam Kabinet karya dan dewan Nasional, lebih didasarkan pada mencegah datangnya *maḍarat* yang lebih besar daripada mencari kebalikan sebagaimana kaidah Fiqh yang berbunyi *Dar Mafāsid Muqaddam alā jalb al-Maṣāliḥ.* Apa yang dimaksud madharat lebih besar itu juga dinyatakan secara eksplisit, yaitu, *pertama* tempat yang disediakan bagi warga NU dapat diduduki oleh anasir lain yang lebih membahayakan. *Kedua*, kedudukan Partai NU sebagai oposisi belum disiapkan , akan bisa merupakan musibah (bencana) yang tidak kita harapkan.[51]

Adapun dalam konsepsi demokrasi, sangat menarik mencermati pandangan Idham tentang demokrasi dalam Islam. Ia berkesimpulan bahwa demokrasi dalam Islam sangat berbeda dengan demokrasi liberal Barat (menunjuk pada sistem Parlementer).

> ....*yang memakai* de helft lus een altidj gelijk *(separo lebih, harus selalu benar). Demokrasi Islam juga bukan demokrasi pura-pura* (schijn democratie) *dimana seorang diktator telah memutuskan sesuatu sebelum musyawarah. Musyawarah yang berlangsung kemudian tidak lebih sebagai formalitas untuk melegalisir kemauan para diktator saja.*[52]

---

[51] Arief Mudatsir Mandan (ed.), *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid: Tanggungjawab Politik NU dalam Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2008), 362-363.
[52] Idham Chalid, *Islam dan Demokrasi Terpimpin*, (Jakarta: Endang-Pemuda, 1965), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian apa yang hendak dikatakan oleh Idham sesungguhnya adalah bahwa jika yang dikritisi oleh Demokrasi Terpimpin dari sistem liberal adalah pentingnya suara mayoritas, maka Islam melakukan hal yang sama. Islam tidak pernah mengajarkan mengambil keputusan semata-mata karena banyaknya dukungan. Begitu pula, jika yang diandaikan oleh Demokrasi Terpimpin adalah suasana yang menghargai pendapat minoritas, musyawarah mufakat yang menghasilkan keharmonisan tanpa mengadu perlu suara, bukannya perpecahan sebagaimana yang menjadi efek samping sistem liberal, maka Islam pun mengajarkan hal yang sama.

Apa yang dikemukakan Idham di atas juga hampir sama dengan pendapat KH. Masjkur:

> *"Misalnya lagi, dalam menyetujui 'Demokrasi Terpimpin', pada umumnya haruslah ditekankan pada perkataan 'Demokrasi'-nya, oleh karena menjadi anutan di kalangan Nahdlatul Ulama berdasarkan keyakinan Islam yang menjadi dasar pokok utama dari partai, nahwa suatu demokrasi yang tidak terpimpin akan bisa menimbulkan anarkhisme, sebaliknya sesuatu yang terpimpin tanpa demokrasi mengantarkan pada diktatorisme. Baik anarkisme maupun diktatorisme ditolak secara prinsipil."*[53]

Akhirnya, Demokrasi Terpimpin bisa sesuai dengan Islam apabila ada dua unsur yang saling melengkapi, saling mengisi dan saling mengawasi. Kedua unsur tersebut adalah: unsur musyawarah yang menghargai pimpinan dan unsur pimpinan yang menghargai musyawarah, atau dengan kata lain "sang pemimpin yang

---

[53] Soebagijo I.N, *KH.Masjkur: Sebuah Biografi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghargai hikmat kebijaksanaan musyawarah dan ahli musyawarah yang menyadari dan menghargai *leiderschap* seorang pemimpin."[54]

Meski setuju dengan Demokrasi terpimpin, namun Idham berusaha membaca konsep yang ditawarkan oleh Soekarno tersebut. Sebab Demokrasi Terpimpin berpotensi menjadi sumbu kepemimpinan diktarorial. Bagi Idham, seorang pemimpin tak boleh hanya mengandalkan kekuasaannya. Ia mesti mendengar dan sungguh-sungguh menghargai pendapat orang. Demokrasi Terpimpin dalam Islam menurut Idham "bukanlah terpimpin oleh kemauan seseorang, bukan oleh nafsu berkuasa manusia, dan bukan oleh sembojan2 kosong, tetapi terpimpin oleh *ḥaq* dan *ahlinya*."[55]

Pandangan-pandangan Idham di atas, merupakan pandangan penting pada saat itu, sebab sebagai Ketua Umum PBNU, ia memiliki andil besar dalam memimpin dan mengarahkan laju organisasinya. Pandangan-pandangan pribadinya secara tak langsung berpengaruh pada laju partainya, dan merupakan gambaran sekilas dinamika pemikiran politik NU. Tak heran jika di masa Demokrasi Terpimpin ini posisi NU terlihat stabil. Sebab, idham membawa NU mengatasi rintangan-rintangan politik. Terjadilah kerjasama yang harmonis antara NU dengan pemerintah, saling menutup kekurangan, saling membantu. Begitu mesranya hubungan antara NU dengan pemerintah, sehingga sebagaian internal Nu

---

[54] Idham Chalid, *Islam dan Demokrasi Terpimpin*, 58.
[55] *Ibid.* 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggap organisasi NU sering menerjang *vivere pericoloso* (istilah yang cukup popular saat itu yang berarti menyerempet bahaya), terhadap hukum syara'. [56]

Hal ini misalnya, dapat dilihat dalam peristiwa berikut ini. Pada akhir 1960, unsur-unsur pokok demokrasi terpimpin sudah jalan. DPR-GR yang beranggotakan kelompok fungsional, militer serta wakil-wakil partai yang sudah disetujui pemerintah telah bertugas, baik di tingkat nasional maupun daerah. Demikian juga dengan MPRS yang mulai bertugas sejak November 1960.[57] Front Nasional yang bertujuan mengerahkan massa juga sudah terbentuk pada bulan Agustus dan beranggotakan partai politik, militer, dan para pemimpin kelompok fungsional.

Dalam bulan yang sama Soekarno melarang partai Masyumi dan PSI, serta menyederhanakan sisten kepartaian dengan mengakui hanya 10 partai politik.[58] Dengan menerima proses restrukturisasi ini, NU bisa mengamankan posisinya dalam rezim yang baru. NU memiliki wakil di semua lembaga Demokrasi terpimpinm bahkan kini menjadi partai Islam terbesar. NU juga menjadi komponen utama dari organisasi keagamaan yang tergabung dalam Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Meskipun secara independensi dan wibawa NU sedikit berkurang, akan tetapi sikap ini menggambarkan watak akomodatif NU. Selama Soekarno masih memberikan kesempatan bagi NU untuk memegang kendali departeman Agama dan menghindari tindakan yang mengganggu pelaksanaan ibadah umat Islam, maka NU

---

[56] Maksoem Machfoedz, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama,* (Surabaya: Yayasan Persatuan Umat, 1982), 168.

[57] MPRS beranggotakan seluruh anggota DPR-GR ditambah wakil sipil dan militer yang ditunjuk. Lembaga ini bertugas memilih presiden dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

[58] Alfian, *Pemikiran dan Perubahan politik Indonesia,* (Jakarta: Gramedia, 1980), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap mau bekerjasama dengan pemerintah. Perhatian PBNU adalah soal bagaimana menyesuaikan dengan keadaan darurat politik, bukan mengubahnya. Hal ini tercermin dalam pidato Idham dalam Muktamar Partai 1962:

"Dalam saat revolusi bangsa Indonesia jang digelorakan sehebat-hebatnja di segala bidang dan dipimpin oleh Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno, di mana seluruh rakjat, mau tidak mau, harus ikut atau terbawa serta oleh revolusi di bidang itu....Seluruh rakjat tidak punja pilihan lain, selain ikut serta berrevolusi atau berdiri di fihak kontra-revolusi. Dalam saat jang bergelora serupa itulah, Muktamar ke-XXII di Djakarta mengutjapkan selamat berdjuang kepada kita dalam memulai periode melaksanakan keputusan-keputusann, menjelamatkan bahtera Partai, untuk didajung terus sedjauh da n sekuat mungkin kea rah tjita-tjitanja. Benar-benar "mendajung dalam taufan..."

Sedikit sadja lengah dan lalai, sedikit sadja kurang mengerti arah angin, sedikit sadja kemudi tidak disesuaikan dengan riak gelombang, nistjaja karamlah kapal ini dan segala isinja...

Kita, untuk menghadapi segala kemungkinan, menampung segala situasi sehingga tatkala roda situasi jang berputar dengan tjepatnja akibat revolusi itu menimbulkan kedjadian- kedjadian dan perkembangan-perkembangan baru maka dengan tangkas dan tjekatan Partai kita menampung situasi itu, dan menempatkan dirinja dalam posisi jang teraman."[59]

Pada bulan-bulan pertama pelaksanaan Demokrasi Terpimpin terlihat proses kristalisasi yang cepat antara pendukung dan penentang terhadap demokrasi gaya baru ini. Siapa yang mendukung dibiarkan hidup, sedangkan yang menentang harus disingkirkan. Ini secara makro. Secara mikro, di kalangan umat Islam, proses kristalisasi juga menjadi kenyataan. Pihak yang ikut dalam sistem ciptaan Soekarno dapat turut serta dalam jaringan kekuasaan atau sebagai peserta pinggiran. Sedangkan pihak yang melawan, bukan saja disingkirkan dari lembaga-lembaga

---

[59] PBNU, "Laporan Katua Umum PB Partai Nahdlatul Ulama dalam Muktamar ke XIII di Sala", 26 Desember 1962. Sebagaimana dikutip ulang oleh Greg Fealy dalam *Ijtihad Politik*.., 284

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik formal, tapi juga partai mereka dibubarkan seperti Masyumi dan PSI dan tokoh-tokoh mereka dipenjarakan bertahun-tahun tanpa alasan yang jelas.

Dengan terbentuknya DPRGR pada April 1960, proses kristalisasi politik di kalangan umat mendapatkan momentum yang kritis dan menentukan, dan proses itu mencapai titik puncak pada akhir 1960 sewaktu Masyumi bubar. Kolaborasi antara Soekarno dan partai-partai Islam, yang berlangsung terus sampai jatuhnya rezim Demokrasi Terpimpin. Pada periode sulit ini partai-partai Islam dapat dikatakan sedang berada di bawah pengaruh kuat NU. Strategi politik NU yang menggunakan Doktrin Pesantren dan Implementasinya dalam Politik Praktis pada periode Demokrasi Terpimpin. KH. Abdul Wahab Chasbullah sebagai tokoh yang berperan dominan dalam perjuangan NU pada waktu diadakannya musyawarah wilayah tentang masuk tidaknya NU ke dalam DPRGR, strateginyalah yang mendapat dukungan besar. Dalam buku Anggaran Dasar NU dikatakan bahwa memuliakan yang tinggi dan mengasihi yang rendah yang merupakan bagian dari tugas Syuriah dalam rangka menguatkan tali persaudaraan di kalangan para Ulama NU. Doktrin ini dengan sendirinya telah memperkuat posisi para sesepuh ulama (Kiai Wahab dan Idham) yang loyal kepada Presiden Soekarno. Idham berpandangan bahwa dalam menghadapi Demokrasi terpimpin, Umat Islam dihadapkan pada dua macam ijtihad politik yang berbeda. Ijtihad pertama berkesimpulan bahwa umat Islam lebih baik masuk ke dalam sistem demi kepentingan Islam, sedangkan Ijtihad kedua berpendapat bahwa demi kepentingan Islam maka umat Islam harus melawan sistem.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijtihad pertama berasal dari pemikiran pihak pesantren dan ijtihad kedua pemikran dari pihak modernis. Keduanya sama-sama berdasarkan keyakinan agama.

Dalam analisis Greg Fealy, ada beberapa catatan penting yang pantas diperhatikan saat para kiai NU bergabung dalam Demokrasi Terpimpin ini.

> *"Ya tapi, pada umumnya semua kyai tidak suka demokrasi terpimpin dan NASAKOM. Meskipun Idham Chalid menulis beberapa buku tentang Nasakom, tapi saya kira dia seperti merasa terpaksa pada waktu itu karena situasi politik. Kalau secara nyata tidak mendukung demokrasi terpimpin itu membahayakan NU, dan juga membahayakan karir politik Idham. Menurut mereka, kalau NU tidak meniru retorika Soekarno, posisi NU terancam dan disudutkan. Jika NU disudutkan akan terancam bahwa tidak ada ormas Islam besar lagi yang masuk sistim politik. Hanya dengan NU umat Islam bisa terwakili. Dan misalnya dengan kasus HMI, ketika organisasi ini diancam dilarang oleh PKI, NU yang membela. Dan akhirnya HMI selamat. NU sangat bangga, karena ini adalah sebuah bukti bahwa lebih efektif terlibat dalam sistim politik daripada tidak sama sekali. Karena itu, keterlibatan dalam demokrasi bagi pandangan politik NU adalah mendukung pula keberadaan kaum nasionalis, komunis dan sebagainya. Tapi preferensi mereka adalah ingin membubarkan PKI. Ini berbeda dengan kelompok militan yang bagi NU sangat merusak kehidupan politik Indonesia, kalau PKI terlibat dalam pemerintahan. Yusuf Hasyim, Machrus Ali dan Syubhan menganggap bahwa harus lebih siap dalam menghadapi kekuatan PKI. Dalam hal ini, mereka lebih siap dalam menghadapi PKI, tetapi mereka juga ingin menggunakan lembaga-lembaga demokrasi untuk kepentingan NU. Kalau warga PKI masuk dalam satu lembaga atau institusi maka otomatis orang NU juga akan masuk, biasanya yang masuk orang militan, bukan orang yang akomodatif.* [60]

Idham juga menekankan bahwa bagi NU dalam melaksanakan Demokrasi Terpimpin, demokrasinya harus mendapatkan penekanan, karena menurut kepercayaan Islam Demokrasi tanpa pimpinan akan menjurus kepada anarki dan

---

[60] Pertengkaran Elit Politik Nahdlatul Ulama (1960-Hingga Kini): Sebuah Wawancara dengan Greg Fealy..http://www.crcs.ugm.ac.id/news_ind.php?news_id=200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemimpinan tanpa demokrasi akan menjurus pada diktator. Dalam pandangan Idham pemerintahan Bung Karno yang sentralistik dan tidak memberi peluang adanya perbedaan pendapat masih dalam kategori Demokrasi. Itulah sebabnya NU di bawah kepemimpinannya tetap berada dalam Demokrasi Terpimpin sampai sistem ini berakhir. Menurut Greg Fealy, Keterlibatan dalam demokrasi bagi pandangan politik NU adalah mendukung pula keberadaan kaum nasionalis, komunis, dan sebagainya. Tapi preferensi mereka adalah ingin membubarkan PKI.[61]

Selain itu dengan bergabung pada situasi yang serba sulit ini, NU bisa memainkan politiknya secara halus, dalam hal ini mengincar kursi Menteri Agama. Kedudukan sebagai menteri agama memang telah menjadi incaran NU. Pada Departemen inilah orang-orang NU seperti di rumah sendiri. Departemen Agama dipandang sebagai jalur politik NU yang efektif, lewat jalur ini NU bisa berkemunikasi dengan massa besarnya sekaligus meluaskan pengaruh ke seluruh Indonesia dan Idham sebagai wakil ketua MPRS kemudian hampir semua lembaga pemerintahan orang-orang NU. Dan ketika masalah ekonomi pada periode Demokrasi Terpimpin hampir-hampir tidak pernah dipikirkan secara serius oleh pemerintah sehingga inflasi pada tahun 1965 mencapai 650% karena sibuk mengurus revolusi, konfrontasi dengan Malaysia dan usaha pengembalian Irian Barat, sistem Demokrasi Terpimpin mungkin masih bisa bertahan beberapa waktu lagi jika

---

[61] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peristiwa Gerakan 30 September 1965 / G 30 S/PKI tidak meledak. Kegagalan gerakan ini membawa Soekarno dengan sistem Demokrasi Terpimpinnya beserta PKI kepada kehancuran politik secara total.[62]

[62] http://www.reformasi.net46.net/index.php?p=1_11_Demokrasi-Terpimpin. Diakses pada tanggal 29 Mei pukul 22.31 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DEMOKRASI TERPIMPIN

A. Konsepsi Demokrasi Terpimpin

Gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 dengan melalui Konstituante dan rentetan peristiwa-peristiwa politik yang mencapai klimaksnya dalam bulan Juni 1959, akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk sampai kepada kesimpulan bahwa telah muncul suatu keadaan kacau yang membahayakan kehidupan negara. Atas kesimpulannya tersebut, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959, dalam suatu acara resmi di Istana Merdeka, mengumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka sebuah sistem demokrasi yakni Demokrasi Terpimpin *(Guided Democracy).*[1] Hingga akhirnya, Demokrasi Terpimpin identik dengan Soekarno.

Dekrit yang dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mendapatkan sambutan dari masyarakat Republik Indonesia yang pada waktu itu sangat menantikan kehidupan negara yang stabil. Namun kekuatan dekrit tersebut bukan hanya berasal dari sambutan yang hangat dari sebagian besar rakyat Indonesia, tetapi terletak dalam dukungan yang diberikan oleh unsur-unsur penting negara lainnya, seperti Mahkamah Agung dan KSAD.[2] Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, Kabinet Djuanda dibubarkan dan pada tanggal 9 Juli 1959, diganti

---

[1] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan : Studi tentang Percaturan dalam Konstituante,* (Jakarta: LP3ES), 177.

[2] Marwati Djoened Poesponegoro dkk., *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI,* (Jakarta: Depdikbud-Balai Pustaka, 1993), 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet tersebut Presiden Soekarno bertindak sebagai perdana menteri, sedangkan Ir. Djuanda bertindak sebagai menteri pertama.

Demokrasi Terpimpin sebenarnya, terlepas dari pelaksanaannya yang dianggap otoriter, dapat dianggap sebagai suatu alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul di dataran politik Indonesia dalam pertengahan tahun 1950-an.[3] Untuk menggantikan pertentangan antara partai-partai di parlemen, suatu sistem yang lebih otoriter diciptakan dimana peran utama dimainkan oleh Presiden Soekarno. Ia memberlakukan kembali konstitusi presidensial tahun 1945 pada tahun 1959 dengan dukungan kuat dari angkatan darat. Akan tetapi Soekarno menyadari bahwa keterikatannya dengan tentara dapat membahayakan kedudukannya, sehingga ia mendorong kegiatan-kegiatan dari kelompok-kelompok sipil sebagai penyeimbang terhadap militer. Dari kelompok sipil ini yang paling utama adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) dan juga walau tidak begitu signifikan peranan dari golongan agama, yaitu khususnya yang diwakili oleh NU yang tergabung dalam poros nasakom soekarno semasa pemberlakuan demokrasi terpimpin. Meskipun pemimpin PKI maupun Angkatan Darat mengaku setia kepada Presiden Soekarno, mereka sendiri masing-masing terkurung dalam pertentangan yang tak terdamaikan.

Soekarno berusaha mengumpulkan seluruh kekuatan politik yang saling bersaing dari Demokrasi Terpimpin dengan jalan turut membantu mengembangkan kesadaran akan tujuan-tujuan nasional. Ia menciptakan suatu ideologi nasional yang

---

[3] Herbert Crouch, *Militer & Politik di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1999), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengharapkan seluruh warga negara memberi dukungan kesetiaan kepadanya. Pancasila ditekankan olehnya dan dilengkapi dengan serangkaian doktrin seperti Manipol-Usdek dan Nasakom. Dalam usahanya mendapatkan dukungan yang luas untuk kampanye melawan Belanda di Irian Barat dan Inggris di Malaysia, ia menyatakan bahwa Indonesia berperan sebagai salah satu pimpinan "kekuatan-kekuatan yang sedang tumbuh" di dunia, yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh Nekolim (neokolonialis, kolonialis dan imperialis). Sebagai lambang dari bangsa, Soekarno bermaksud menciptakan suatu kesadaran akan tujuan nasional yang akan mengatasi persaingan politik yang mengancam kelangsungan hidup sistem Demokrasi Terpimpin.

Sampai dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 pada bulan Juli 1959, Presiden Soekarno adalah pemegang inisiatif politik, terutama dengan tindakan dan janji-janjinya yang langsung ditujukan kepada pembentukan kembali struktur konstitusional. Akan tetapi, tekananannya kemudian mulai bergeser kepada tindakan simbolis dan ritual, serta khususnya kepada perumusan ideologi seraya melemparkan gagasan-gagasannya berulang kali. Presiden Soekarno dalam hal ini menciptakan doktrin negara yang baru.[4]

Demokrasi terpimpin dan gagasan presiden yang schubungan dengan itu sudah menguasai komunikasi massa sejak pertengahan tahun 1958. Sejak itu tidak mungkin bagi surat kabar atau majalah berani terang-terangan mengecam Demokrasi

---

[4] Herbert Feith, *Soekarno-Militer Dalam Demokrasi Terpimpin,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terpimpin, lambang dan semboyan-semboyan baru. Pada paruh kedua 1959, Presiden Soekarno semakin mementingkan lambang-lambang. Dalam hubungan ini yang terpenting ialah pidato kenegaraan presiden pada ulang tahun kemerdekaan RI tahun 1959 dan selanjutnya hasil kerja Dewan Pertimbangan Agung dalam penyusunan secara sistematis dalil-dalil yang terkandung dalam pidato tersebut. Pidato kenegaraan yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita", sebagian besar memuat alasan-alasan yang membenarkan mengapa harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Sesungguhnya hanya sedikit tema-tema baru dalam pidato presiden, tetapi pidato itu penting karena berkaitan dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar revolusioner tersebut. Tiga bulan setelah pidato kenegaraannya itu, Presiden Soekarno menyatakan naskah pidato itu menjadi "manifesto politik Republik Indonesia". Bersamaan dengan itu presiden mengesahkan rincian sistematikanya yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Agung. Dalam pidato-pidatonya di awal tahun 1959, presiden selalu mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia memiliki lima gagasan penting.[5] Pertama, Undang-Undang Dasar 1945; kedua, sosialisme ala Indonesia; Ketiga, Demokrasi Terpimpin; keempat, Ekonomi Terpimpin; dan yang terakhir kelima, kepribadian Indonesia. Dengan mengambil huruf pertama masing-masing gagasan itu maka muncullah singkatan USDEK. "Manifesto Politik Republik Indonesia" disingkat "Manipol", dan ajaran baru itu dikenal dengan nama "Manipol-USDEK".

---

[5] *Ibid*, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manipol-USDEK benar-benar memiliki daya pikat bagi banyak masyarakat politik. Masyarakat politik ini, yang didominasi pegawai negeri, sudah lama mendukung apa yang selalu ditekankan presiden mengenai kegotong-royongan, menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan golongan dan kemungkinan mencapai mufakat melalui musyawarah yang dilakukan dengan penuh kesabaran. Ada dua sebab mengenai hal ini pertama, keselarasan dan kesetiakawanan merupakan nilai yang dijunjung masyarakat-masyarakat Indonesia. Dan kedua, bangsa Indonesia benar-benar menyadari betapa berat kehidupan yang mereka rasakan akibat keterpecahbelahan mereka dalam tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, banyak yang tertarik kepada gagasan bahwa apa yang diperlukan Indonesia dewasa ini adalah orang-orang yang berpikiran benar, berjiwa benar dan patriot sejati. Bagi anggota beberapa komunitas Indonesia, terutama bagi orang-orang Jawa, mereka menemukan makna yang sesungguhnya dalam berbagai skema rumit yang disampaikan presiden itu ketika mengupas cara pandang secara panjang lebar Manipol-USDEK, yang menjelaskan arti dan tugas-tugas khusus tahapan sejarah sekarang ini.

Barangkali daya tarik terpenting Manipo-USDEK terletak pada kenyataan bahwa ideologi ini menyajikan sebuah arah baru. Mereka tidak begitu banyak tertarik pada makna dasar dari arah tersebut. Yang pokok ialah bahwa presiden menawarkan sesuatu pada saat terjadi ketidakjelasan arah yang dituju. Nilai-nilai dan pola-pola kognitif berubah terus dan saling berbenturan, sehingga timbul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keinginan yang kuat untuk mencari perumusan yang dogmatis dan skematis mengenai apa yang baik dalam politik. Satu tanggapan umum terhadap Manipol-USDEK ialah bahwa Manipol-USDEK bukanlah merupakan ideologi yang sangat baik atau lengkap tetapi pada akhir tahun 1950-an dibutuhkan sebuah ideologi dalam kerangka pembangunan Indonesia.

Apakah butir-butir Demokrasi Terpimpin itu? Dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1959 dengan judul "Penemuan Kembali Revolusi Kita", Presiden Soekarno mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar Demokrasi Terpimpin adalah :

1. Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, bangsa, dan Negara.
2. Tiap-tiap orang berhak mendapatkan penghidupan yang layak dalam masyarakat bangsa, dan Negara.

Sedangkan dalam amanatnya pada 22 April 1959, Presiden RI pertama tersebut membeberkan tidak kurang dari 12 definisi tentang Demokrasi terpimpin. Definisi-definisi tersebut pada dasarnya telah disampaikan oleh pemerintahan Djuanda sebelumnya dan nampaknya disetujui oleh Soekarno. Satu definisi mengatakan "Demokrasi Terpimpin ialah demokrasi, atau, dalam UUD 1945 dikatakan demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan". Sedangkan dalam kesempatan lain Soekarno

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan, "Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarki liberalisme, tanpa otokrasi diktatur." [6]

Soekarno dengan konsep Demokrasi Terpimpinnya menilai Demokrasi Barat yang bersifat liberal tidak dapat menciptakan kestabilan politik.[7] Menurut Soekarno, penerapan sistim Demokrasi Barat menyebabkan tidak terbentuknya pemerintahan kuat yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia. Pandangan Soekarno terhadap sistem liberal ini pada akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan partai politik di Indonesia. Partai politik dianggap sebagai sebuah penyakit yang lebih parah daripada perasaan kesukuan dan kedaerahan. Penyakit inilah yang menyebabkan tidak adanya satu kesatuan dalam membangun Indonesia. Partai-partai yang ada pada waktu itu berjumlah sebanyak 40 partai dan ditekan oleh Soekarno untuk dibubarkan. Namun demikian, Demokrasi Terpimpin masih menyisakan sejumlah partai untuk berkembang. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan Soekarno akan keseimbangan kekuatan yang labil dengan kalangan militer. Beberapa partai dapat dimanfaatkan oleh Soekarno untuk dijadikan sebagai penyeimbang.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, parlemen sudah tidak mempunyai kekuatan yang nyata. Sementara itu partai-partai lainnya dihimpun oleh Soekarno dengan menggunakan suatu ikatan kerjasama yang didominasi oleh sebuah ideologi. Dengan demikian partai-partai itu tidak dapat lagi menyuarakan gagasan dan keinginan

---

[6] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, 183

[7] Karim, Rusli, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Potret Pasang-Surut*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok-kelompok yang diwakilinya. Partai politik tidak mempunyai peran besar dalam pentas politik nasional dalam tahun-tahun awal Demokrasi Terpimpin. Partai politik seperti NU dan PNI dapat dikatakan pergerakannya dilumpuhkan karena ditekan oleh presiden yang menuntut agar mereka menyokong apa yang telah dilakukan olehnya. Sebaliknya, golongan komunis memainkan peranan penting dan temperamen yang tinggi. Pada dasarnya sepuluh partai politik yang ada tetap diperkenankan untuk hidup, termasuk NU dan PNI, tetapi semua wajib menyatakan dukungan terhadap gagasan presiden pada segala kesempatan serta mengemukakan ide-ide mereka sendiri dalam suatu bentuk yang sesuai dengan doktrin presiden.[8]

B. Demokrasi Terpimpin dan Partai Politik

Partai politik dalam pergerakannya tidak boleh bertolak belakang dengan konsepsi Soekarno. Penetapan Presiden (Penpres) adalah senjata Soekarno yang paling ampuh untuk melumpuhkan apa saja yang dinilainya menghalangi jalannya revolusi yang hendak dibawakannya. Demokrasi Terpimpin yang dianggapnya mengandung nilai-nilai asli Indonesia dan lebih baik dibandingkan dengan sistim ala Barat, ternyata dalam pelaksanaannya lebih mengarah kepada praktek pemerintahan yang otoriter. Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 1955 yang di dalamnya terdiri dari partai-partai pemenang pemilihan umum, dibubarkan. Beberapa partai yang dianggap terlibat dalam pemberontakan sepanjang tahun

[8] Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia: Sebuah*, 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1950an, seperti Masyumi dan PSI, juga dibubarkan dengan paksa. Bahkan pada tahun 1961 semua partai politik, kecuali 9 partai yang dianggap dapat menyokong atau dapat dikendalikan, dibubarkan pula.[9]

Dalam penggambaran kiprah partai politik di percaturan politik nasional, maka ada satu partai yang pergerakan serta peranannya begitu dominan yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masa itu kekuasaan memang berpusat pada tiga kekuatan yaitu, Soekarno, TNI-Angkatan Darat, dan PKI. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran mengenai kehidupan partai politik pada masa demokrasi terpimpin, pergerakan PKI pada masa ini tidak dapat dilepaskan.[10]

PKI di bawah pemimpin mudanya, antara lain Aidit dan Nyoto, menghimpun massa dengan intensif dan segala cara, baik secara etis maupun tidak. Pergerakan PKI yang sedemikian progresifnya dalam pengumpulan massa membuat PKI menjadi sebuah partai besar pada akhir periode Demokrasi Terpimpin. Pada tahun 1965, telah memiliki tiga juta orang anggota ditambah 17 juta pengikut yang menjadi antek-antek organisasi pendukungnya, sehingga di negara non-komunis, PKI merupakan partai terbesar.

Hubungan antara PKI dan Soekarno sendiri pada masa Demokrasi Terpimpin dapat dikatakan merupakan hubungan timbal balik. PKI memanfaatkan popularitas Soekarno untuk mendapatkan massa. Pada bulan Mei 1963, MPRS mengangkatnya

---

[9] *Ibid.*

[10] Persaingan antara AD, PKI, serta unsur Islam (baca: NU) merupakan kompetisi yang panas. Kompetisi tiga kekuatan ini bisa dibaca lebih lengkap dalam Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 61-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi presiden seumur hidup. Keputusan ini mendapat dukungan dari PKI. Sementara itu di unsur kekuatan lainnya dalam Demokrasi Terpimpin, TNI-Angkatan Darat, melihat perkembangan yang terjadi antara PKI dan Soekarno, dengan curiga. Terlebih pada saat angkatan lain, seperti TNI-Angkatan Udara, mendapatkan dukungan dari Soekarno. Hal ini dianggap sebagai sebuah upaya untuk menyaingi kekuatan TNI-Angkatan Darat dan memecah belah militer untuk dapat ditunggangi. Keretakan hubungan antara Soekarno dengan pemimpin militer pada akhirnya muncul. Keadaan ini dimanfaatkan PKI untuk mencapai tujuan politiknya. Sikap militan yang radikal yang ditunjukkan PKI melalui agitasi dan tekanan-tekanan politiknya yang semakin meningkat, membuat jurang permusuhan yang terjadi semakin melebar. Konflik yang terjadi itu kemudian mencapai puncaknya pada pertengahan bulan September tahun 1965.[11]

Seperti yang telah disebutkan di atas, partai politik pada masa Demokrasi Terpimpin mengalami pembubaran secara paksa. Pembubaran tersebut pada umumnya dilakukan dengan cara diterapkannya Penerapan Presiden (Penpres) yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 1959. Peraturan tersebut menyangkut persyaratan partai, sebagai berikut:[12]

1. Menerima dan membela Konstitusi 1945 dan Pancasila.

---

[11] Afan Gaffar, *Politik Indonesia*, 65.
[12] Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia: Sebuah*, 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya.
3. Menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah.
4. Partai-partai harus mempunyai cabang-cabang yang terbesar paling sedikit di seperempat jumlah daerah tingkat I dan jumlah cabang-cabang itu harus sekurang-kurangnya seperempat dari jumlah daerah tingkat II seluruh wilayah Republik Indonesia.
5. Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai.
6. Presiden berhak membubarkan partai, yang programnya diarahkan untuk merongrong politik pemerintah atau yang secara resmi tidak mengutuk anggotanya partai, yang membantu pemberontakan.

Sampai dengan tahun 1961, hanya ada 10 partai yang diakui dan dianggap memenuhi prasyarat di atas. Melalui Keppres No. 128 tahun 1961, partai-partai yang diakui adalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII dan IPKI. Sedangkan Keppres No. 129 tahun 1961 menolak untuk diakuinya PSII Abikusno, Partai Rakyat Nasional Bebasa Daeng Lalo dan partai rakyat nasional Djodi Goondokusumo. Selanjutnya melalui Keppres No. 440 tahun 1961 telah pula diakui Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti).

Demikianlah kehidupan partai-partai politik di masa Demokrasi Terpimpin. Partai-partai tersebut hampir tidak bisa memainkan perannya dalam pentas perpolitikan nasional pada masa itu. Hal ini dimungkinkan antara lain oleh peran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soekarno yang amat dominan dalam menjalankan pemerintahannya dengan cirinya utamanya yang sangat otoriter pada waktu itu di era Demokrasi Terpimpin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMIKIRAN KH. IDHAM CHALID TENTANG DEMOKRASI TERPIMPIN

A. Latarbelakang Pemikiran KH. Idham Chalid tentang Demokrasi Terpimpin

Sebagaimana yang telah dijelaskan di BAB II, bagi Idham berpolitik semestinya berorientasi kepada kemaslahatan dan berguna bagi orang banyak, dan karenanya tidak mesti *ngotot-ngototan* atau kaku dalam bersikap. Ia menggambarkan seorang politisi yang baik mestilah memahami "filosofi air". Harus mudah meresap dan menyesuaikan diri.

Air apabila dimasukkan pada sebuah gelas maka ia akan berbentuk gelas, bila dimasukkan ke ember akan berbentuk ember. Apabila dibelah dengan benda tajam, ia terputus sesaat dan cepat kembali ke bentuk asalnya. Dan air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Apabila disumbat dan dibendung ia bisa bertahan, bergerak elastis mencari resapan. Bila dibuatkan kanal dia mampu menghasilkan tenaga penggerak turbin listrik serta mampu mengairi sawah dan tanaman sehingga berguna bagi kehidupan makhluk di dunia. -*Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup (al Anbiya : 30)*". [1]

Salah satunya tentang pendapat Idham tentang Demokrasi Terpimpin yang ia tulis dalam bokletnya, *Islam dan Demokrasi Terpimpin.* Di saat pemimpin Islam

[1] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid,* 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya menolak konsepsi dari Soekarno tersebut, Idham berusaha mencari penyesuaian dan mempertemukan antara Islam Demokrasi Terpimpin. Ada dua hal dalam pemikiran Idham Chalid yang mesti dicermati lebih jauh. *Pertama*, ketika dia menyatakan bahwa musyawarah (*syūra*) adalah bukti adanya demokrasi dalam Islam atau dengan kata lain *syūra* adalah demokrasi dalam Islam. *Kedua*, ketika Idham menyamakan beberapa hal dalam *syūra* dengan Demokrasi Terpimpin.

Suatu hal yang harus ditegaskan lebih dahulu di sini, bahwa Idham menganggap *syūra* (musyawarah) setara dengan demokrasi, sehingga Demokrasi Terpimpin dipadankannya dengan musyawarah terpimpin. Artinya, Idham mengukur baik demokrasi maupun Demokrasi Terpimpin dari kesamaannya dengan *syūra*. Di sinilah Idham menunjukkan sikap "eklektik" dengan pengertian mencari dari *syūra* hal-hal yang sesuai-untuk kemudian menjembataninya, dengan dua hal yang berbeda: demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Dengan mudahnya, Idham menemukan berbagai justifikasi sejarah dan "membongkar pasang" konsep *syūra* lalu menyesuaikannya dengan dua sistem besar yang pernah ada dalam sejarah politik Indonesia.

Pandangan Idham tentang *syūra* yang demikian telah melegitimasi sistem Demokrasi Terpimpin dan sikap bekerja sama dengannya. Idham yang merupakan ketua umum NU telah memutuskan untuk bekerja sama dengan rezim baru. Kerja sama berarti menerima dan mendukung program-program pemerintah dengan konsesi NU dibiarkan tetap eksis dalam percaturan politik nasional. Sebagai seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pimpinan partai Islam tentulah Idham selalu mendasarkan segala aktifitas politiknya pada ajaran agama. Ajaran agamalah yang menarik basis massanya untuk mendukung partai. Dalam hal menerima Demokrasi Terpimpin, Idham melakukan hal yang sama. Ia menjelaskan Demokrasi Terpimpin dari sudut pandang Islam, dan kesimpulannya sistem tersebut sejalan dengan *syūra*.

Sikap-sikapnya yang disebutkan ini menjadi kekuatan sekaligus kelemahannya, yang darinya Idham banyak mendapat kritik. Karena sikap ini, Idham terus berada di posisi Ketua Umum PBNU dalam waktu yang lama, mendapat posisi di pemerintahan dan berbagai Lembaga Negara sejak Orde Lama hingga Orde Baru.[2] Di sisi yang lain para pengkritiknya menganggap sikap ini tidak layak dan seperti tidak memiliki prinsip. Para pemimpin Ansor, misalnya menjuluki Idham 'politisi gabus' karena apapun yang terjadi di sungai politik, 'dia selalu mengambang di atas'. Mengenai keluwesan sikap Idham, Mahbub Junaidi menyatakan kepada rekan-

[2] Sampai Gerakan 30 September yang menghebohkan itu, Idham masih setia kepada Soekarno dan ia harus berhadapan dengan kaum muda NU militan yang membenci sikap akomodatifnya. Kaum muda ini berperan banyak dalam pembantaian massal terhadap PKI, memiliki kecenderungan untuk memuluskan transisi menuju Orde Baru dan membuka jalan penyerahan kekuasaan ke tangan Suharto. Hanya di saat-saat terakhir ketika Soekarno dengan keras kepala terus mempertahankan pendapatnya tentang posisi kaum komunis dalam arah kehidupan bernegara, dan tampak tidak bersimpati pada korban kudeta dengan menyebut kejadian itu hanyalah 'buih di lautan revolusi', serta perlindungannya terhadap beberapa menteri yang dicurigai terkait dengan peristiwa itu; saat angin perubahan politik bertiup kencang meninggalkan Soekarno, Idham terpaksa meninggalkannya dan mempertahankan NU melewati transisi kekuasaan ini. Greg Fealy, *Ijtihad,* 325-351; dan Andree Feeillard, *NU vis-a-vis Negara, Pencarian Bentuk, Isi dan Makna,* terj: Lesmana (Yogyakarta: LKiS, 1999), terutama halaman 95-105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekannya bahwa Idham akan dapat dengan mudah menjadi wakil perdana menteri dalam pemerintahan Aidit hingga Soekarno.[3]

Walaupun dalam konteks politik hal ini tidak serta merta menjadi faktor yang menyebabkan Idham lebih bersepakat dan mendukung gagasan-gagasan Soekarno. Secara umum, seperti kesimpulan Fealy, cukup alasan untuk mempercayai hubungan Soekarno dan tokoh-tokoh NU terutama didasarkan atas kepentingan bersama dan bahwa NU, terlepas dari rasa hormatnya pada Soekarno, tidak akan memberikan dukungan politiknya kepada presiden tersebut bila tidak mendapat keuntungan.[4]

Idham menjadi pendukung Soekarno, terutama di masa Demokrasi Terpimpin dilaksanakan, demi menjaga agar NU dan dirinya terus bisa bermain di tengah-tengah arena politik, sekalipun bukan menjadi pemain utama bahkan nyaris terhimpit di antara segi tiga Soekarno, militer, dan I. ada masa itu, Idham menduduki posisi sebagai anggota D A, dan Front Nasional dan wakil ketua S. Ali aidar menjelaskan, meskipun politik akomodasi atau penyesuaian diri harus dilakukan hal ini karena pertimbangan ketidaksiapan ummat pendukung untuk melakukan oposisi terhadap pemerintah. Tetapi, dalam berbagai hal NU mampu tampil dengan menggunakan posisi politiknya sebagai orang dalam pemerintah untuk melawan agitasi dan aksi sepihak I di banyak tempat, suatu hal yang

---

[3] Greg Fealy, *Ijtihad,* 353. Kritik juga dilontarkan para peneliti NU yang menurut kategori Greg Fealy menggunakan 'Pendekatan yang didominasi modernis'.
[4] *Ibid.*, 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut NU tak mungkin dilakukan jika NU melawan pemerintah, dicap kontra revolusi atau reaksioner. Hal ini pun diakui oleh Njono, gembong PKI, yang mengatakan "NU sangat menyulitkan PKI. Dikatakan reaksioner, nyatanya NU petani, buruh kecil dan dicintai rakyat. Menurut Njono, NU juga menyulitkan PKI karena posisinya yang dekat dengan Presiden Soekarno.[5]

Secara umum, perubahan dari sistem Parlementer menjadi sistem Terpimpin membuat partai-partai yang dulu menjadi pemeran utama panggung politik menjadi kehilangan *power*-nya. Kini, tinggallah Soekarno dan militer yang dapat mengklaim kekuasaan, dan memberi kesempatan pada pihak-pihak yang mau bekerja sama dengan mereka. PKI telah membuktikan kemampuannya dalam menarik minat Soekarno, sehingga partai tersebut mendapat kedudukan dan posisi politik; sementara umat Islam mengalami kerugian besar dan kehilangan pengaruh. Penyebabnya antara lain, karena golongan Islam dianggap memiliki "dosa-dosa politik yang besar" karena terlibat dalam sistem parlementer yang lebih banyak menghasilkan pertikaian dari pada menyelesaikan masalah nasional, juga karena partai-partai ini mengalami demoralisasi yang berbentuk korupsi dan berbagai penyimpangan sebagaimana partai-partai lain yang pernah berkuasa.[6] Hal ini diperparah dengan buruknya hubungan beberapa organisasi Islam terkemuka dengan Soekarno, sang penguasa rezim Demokrasi Terpimpin. Akibatnya, hanya sekitar setengah umat Islam yang mau bekerja sama dengan rezim Soekarno. Organisasi-

---

[5] Ali Haidar. *Nahdatul Ulama,* 168 .
[6] Lih. Herbert Feith, *Soekarno-Militer*.. 29 dan Ulf Sundhaussen, *Politik Militer,* 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi Islam terkemuka seperti Muhammadiyah, sebelumnya telah menunjukkan kekecewaannya dengan tidak turut memperebutkan pengaruh dan kekuasaan pada masa tersebut. Sedangkan kekuatan lainnya, terutama Perti dan Masyumi yang selama itu menjadi kekuatan oposisi di pedalaman, dapat ditaklukkan dan dibuat tak berkutik.[7]

Praktis hanya NU yang merupakan kekuatan politik Islam yang diperhitungkan pada zaman Demokrasi Terpimpin. Walaupun demikian, kekuatan ini hanya cukup untuk sekedar berpartisipasi dan melindungi kepentingan partai dan basis massanya. Usaha Yayasan Api Islam (sebuah yayasan yang berafiliasi dengan NU) untuk melakukan rekonsiliasi antara Islam dan Soekarnoisme pun tidak cukup mampu menarik perhatian penguasa.[8] NU tidak banyak mempengaruhi arah dan kebijakan negara: porsinya sangat terbatas. NU seumpama "anak kecil" yang berdiri di hadapan "raksasa-raksasa" penguasa Demokrasi Terpimpin, yakni Soekarno, Militer dan PKI.

Dalam kondisi seperti itu, NU harus menghadapi ancaman dari lawan politiknya, PKI. Ketegangan ini terutama terjadi di pedesaan, yang sama-sama merupakan basis massa kedua partai. Hubungan antara kaum muslimin di pedesaan dengan para anggota komunis, setelah sekian lama diwarnai oleh pra sangka dan kebencian, meledak dalam bentuk bentrokan dan kekerasan fisik pada 1964 dan

---

[7] Howard M. Federspiel, "Soekarno dan Apolog-apolog Muslimnya", terj. Jajat Burhanuddin dan Nasrullah Ali Fauzi, dalam *Ulumul Quran* no. 7 (Jakarta: LSAF, 1990), 36.
[8] *Ibid.*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1965, ketika PKI melakukan 'aksi sepihak' untuk melaksanakan *land reform.* Aksi sepihak ini telah mengubah ketakutan terhadap serangan komunis menjadi kenyataan. Ini meruapakan faktor kunci dalam penjelasan mengenai kekerasan massal yang menyusul gagalnya kudeta pada bulan Oktober 1965.[9]

Latar belakangnya yang seorang guru membuatnya santun dalam berpolitik, mampu tenang berhadapan dan "bekerjasama" dengan musuh politik seperti Aidit dan PKI-nya. Ia juga sangat dipengaruhi Wahab Chasbullah, Rais 'Aam Nahdatul Ulama, yang perannya sangat kuat dalam pembentukan karakter NU dan arah kebijakan partai. Dominasi Wahab dalam partai selama akhir 1950-an memperlihatkan bahwa sikap pragmatis tidak hanya wajar secara politik, tetapi dibenarkan secara keagamaan.[10] Selain menghormati para guru dan kiai, Idham sangat menghormati dan menghargai para ulama dan karenanya mampu bertahan lama di NU. Ia juga sering digambarkan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik, sikapnya luwes dan cenderung menghindari konflik yang tidak perlu. Ia juga memiliki insting politik yang baik, pintar "membaca angin" dan karenanya cenderung pragmatis dalam bersikap. Perjalanan politiknya sering digambarkan seperti "mendayung dalam taufan" atau "meniti buih".

---

[9] Greg Fealy, *Ijtihad.* 318.
[10] Ahmad Muhajir, *Idham Chalid,* 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pemikiran KH. Idham Chalid tentang Demokrasi Terpimpin

Sebagai seorang yang dibesarkan di kalangan tradisionalis dan mendapatkan pendidikan modern, Idham memiliki pandangan visioner dan kepercayaan diri yang kukuh. Selain itu langkah-langkah politiknya tak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip dan etika politik Sunni yang telah dipakai oleh NU secara organisatoris. Sikap ini didasarkan pada beberapa prinsip dalam hukum Islam, yang antara lain : pertama, *mā lā yudraku kulluh lā yutraku kulluh,* yang artinya kewajiban yang tidak mungkin diwujudkan secara utuh tidak boleh ditinggalkan semua- bagian terpenting yang telah berhasil diwujudkan) ; kedua, *dar' al mafāsid muqaddam ala jalb al mashālih* artinya mendahulukan upaya menghindari bahaya atau kerusuhan daripada melaksanakan kemaslahatan yang mengandung resiko lebih besar ; ketiga, *iza ta'ārada mafsadatāni ru'iyaa a'zamuhuma dararan bi irtika akhaffihima* artinya apabila terjadi kemungkinan kompilasi bahaya maka dipertimbangkan bahaya yang paling besar resikonya dengan melaksanakan yang paling kecil resikonya.[11]

Inilah solusi secara fiqh yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika politik NU sepanjang sejarah Indonesia dan mencegahnya terperosok dalam berbagai bentuk radikalisme yang justeru kontraproduktif terhadap cita-cita agama dan negara bangsa dan maṣlaḥah bagi ummat. Apa yang dilakukan oleh Idham dalam

---

[11] Jalāluddin al-Suyuṭi, *al-Asybāh wa al-Naẓāir fi al-Furū',* (Semarang: Thoha Putra, tt), 83-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

periode Demokrasi Tempimpin itu merupakan implementasi dari doktrin fiqh tersebut.

Keterlibatan NU dalam kabinet Nasakom, menurut KH. Muchith Muzadi merupakan sebuah ijtihad politik dengan beberapa pertimbangan antara lain; *pertama*, mencegah jangan sampai membentuk kabinet nasakom tanpa ada partai Islam yang cukup kuat. Masyumi sudah dibubarkan dan partai-partai Islam lain sangat kecil. *Kedua,* Soekarno sendiri sesungguhnya bukan komunis, tetapi mengakui ekssistensi dan potensi komunis dalam percaturan politik di Indonesia. *Ketiga,* NU masih memiliki kepercayaan diri akan mampu bertarung dalam Kabinet Nasakom karena masih dapat diperhitungkan oleh kelompok politik lain. *Keempat,* pada masa itu, NU terus menerus menentang segala macam aksi PKI, bahkan berani berhadapan langsung dengan partai komunis ini.[12]

Dalam hal ini, jika ditinjau dari aspek fiqh, upaya yang telah dilakukan oleh Idham telah melaksanakan dua aspek penting dalam pemerintahan Islam. Adapun dalam aspek intenal, negara berkuasa penuh atas semua individu dan institusi-institusi yang ada dalam negara Islam. Rakyat wajib taat sepenuhnya kepada pemerintah sepanjang masih dalam batas-batas *shari'ah.*

Dalam aspek ini, al-Mawardi menjelaskan apabila imam (kepala negara) telah menjalankan semua tugas-tugasnya dalam memenuhi hak-hak rakyatnya dan menegakkan hak-hak Allah SWT diantara mereka, maka wajib bagi rakyatnya

---

[12] A. Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, (Surabaya: Khalista, 2006), 80-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi dua hak sang imam yaitu : hak mentaatinya dan hak membantu tugasnya.[13]

Dari sini tampak bahwa Idham memandang bahwa dalam kondisi apapun, tugas mewujudkan maṣlaḥah harus diwujudkan, sebab negara memiliki peranan penting sebagai sebuah "kesepakatan" dari berbagai elemen bangsa.

Jika diamati, dari contoh keputusan penting di atas, secara metamorfosis, NU membuat pilihan-pilihan politik hukum *(istinbaṭ ḥukm al-siyāsy)* terhadap pola-pola perubahan sistem kekuasaan. Pada saat sidang Konstituante tahun 1958, NU memperjuangkan berlakunya syariat dalam undang-undang negara. Pada 1959, NU menerima Dekrit Presiden Soekarno untuk memberlakukan kembali ke UUD 1945.

Bagi NU, penerimaan Dekrit Presiden 1959 dan penerimaan Pancasila sebagai asas negara adalah dalam konteks teritori Indonesia sebagai negara damai *(dār al-ṣulḥ),* sedangkan perjuangan pemberlakuan yariat Islam di dalam konstituante merupakan wujud komitmen terhadap idealisme *dār al-Islām,* yaitu gagasan mengaplikasikan syariat melalui legislasi undang-undang negara.[14]

Meskipun NU bergabung dalam kabinet nasakom, NU tetap bersikap antagonis dan keras terhadap PKI. Posisi NU pada masa ini betul-betul berada di "persimpangan jalan". Di satu sisi NU digiring untuk menerima konsep nasakom, dengan garansi akan diberikan kesempatran untuk eksis dan dapat melaksanakan

---

[13] Imam Abi al-Hassan 'Ali Muhammad Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭaniyyah wal wilayat al-Diniyyah,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1960), 15.

[14] Asep Taufik Akbar, *Akar-akar pergumulan kelahiran Konsep Wali al-amr al-dharury bi al-syaukah,* (Jurnal Taswirul Afkar edisi No 17 th 2004), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugas-tugas keummatan. Namun di sisi lain NU harus tetap konsisten dan komitmen terhadap akidah dan nilai-nilai Islam secara makro.

Dalam posisi dilematis itulah, NU mengambil sikap tegas dengan tetap menempatkan kepentingan umat Islam secara makro. Dalam hal ini NU berpedoman pada akaidah mereka yang sudah masyhur, *"Menghindarkan kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan (mashlahah)".*[15]

Pemikiran fiqh, dengan demikian, mencegah suatu cara pandang monokultural terhadap realitas dan pada saat yang sama menyediakan daerah sangga yang rasional bila tujuan keagamaan dalam wilayah politik mengalami jalan buntu. Pemikiran serba fiqh menyediakan jalan keluar tanpa harus terjebak dalam sikap-sikap yang ekstrem. Selain itu, wujud formal negara yang telah memenuhi kualifikasi menurut *syari'ah*, yang secara *de jure* diputuskan dalam Muktamar NU di Banjarmasin pada 1936, merupakan perintah agama yang harus diikuti.[16]

Dalam babakan sejarah berikutnya, misalnya, para ulama NU misalnya pernah memperjuangkan agar *syari'ah* bisa dimasukkan dalam undang-undang negara pada sidang-sidang Konstituante 1958-1959. Namun, ketika usaha ini menemui jalan buntu, maka mereka tidak menolak eksistensi UUD 1945 dan Indonesia sebagai negara bangsa, tetapi menerimanya sebagai realitas politik dengan penuh kesungguhan, terutama karena umat Islam diberi kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya.

---

[15] Bahrul Ulum, *Bodohnya NU atau NU Dibodohi*, (Yogyakarta: ar-Ruzz, 2003), 76.
[16] M. Ali Haidar, NU : *Wawasan Sosio-Kultural dan Keagamaan*, Majalah Aula, Maret 1994

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penghadapan dengan kekuasaan dan negara, Islam di Indonesia sering berada pada posisi dilematis. Dilema yang dihadapi menyangkut tarik-menarik antara tuntutan untuk aktualisasi diri secara determinan sebagai kelompok mayoritas dan kenyataan kehidupan politik yang tidak selalu kondusif bagi aktualisasi diri tersebut. Sebagai akibatnya, politik Islam dihadapkan pada beberapa pilihan strategis yang masing-masing mengandung konsekuensi dalam dirinya.

Pertama, strategi *akomodatif justifikatif* terhadap kekuasaan negara yang sering tidak mencerminkan idealisme Islam dengan konsekuensi menerima penghujatan dari kalangan "garis keras" umat Islam. *Kedua*, strategi *isolatif-oposisional*, yaitu menolak dan memisahkan diri dari kekuasaan negara untuk membangun kekuatan sendiri, dengan konsekuensi kehilangan faktor pendukungnya, yaitu kekuatan negara itu sendiri, yang kemudian dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain. *Ketiga*, strategi *integratif-kritis*, yaitu mengintegrasikan diri ke dalam kekuasaan negara, tetapi tetap kritis terhadap penyelewengan kekuasaan dalam suatu perjuangan dari dalam. Namun, strategi ini sering berhadapan dengan hegemoni negara itu sendiri, sehingga efektifitas perjuangannya dipertanyakan.

Sikap politik Idham yang akomodatif dan "berfilosofi air" tersebut merupakan prinsip politik yang bersandarkan pada fiqh, yang secara konseptual dirumuskan sebagaimana di bawah ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Tawāsuṭ dan i'tidal*, yakni sikap tengah yang berintikan tentang prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama.
2. *Tasāmuh*, yakni sikap toleran terhadap perbedaan-perbedaan pandangan, baik dalam soal keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat *furu'* atau menjadi khilafat atau perbedaan, serta dalam soal kemasyarakatan dan kebudayaan.
3. *Tawāzun*, yakni sikap seimbang dalam berkhidmah kepada Allah ta'ala, kepada manusia serta kepada lingkungan hidupnya, menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa datang.
4. *Amar ma'ruf nahi munkar*, sikap selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.[17]

Keempat prinsip di atas Dalam diskursus politik Islam (*al-Fiqh as-Siyāsyi*), upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dirumuskan dalam suatu kaidah[18]:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan seorang pemimpin kepada rakyatnya harus selaras dengan maṣlaḥah"

---

[17] Tim Penulis PBNU, *Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah 1926*. (Bandung: Risalah, 1985), 98.
[18] Abd al-Hamid Hakim, *As-Sulam*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.), II: 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abd al-Wahab Khalaf, kaidah di atas dapat dijadikan sebagai landasan teori hukum atau referensi untuk pengambilan keputusan hukum aktual, apabila memenuhi tiga kriteria berikut ini. *Pertama,* maslahah itu bersifat essensial, yakni kepentingan yang secara praksis dapat mewujudkan kesejahteraan umum dan mencegah timbulnya kerusakan. *Kedua,* maslahah itu ditujukan pada kepentingan rakyat banyak, bukan individu. *Ketiga,* maslahah itu tidak bertentangan dengan ketetentuan atau dalil-dalil umum *naṣ.*[19]

Implementasi dari prinsip di atas adalah saat Demokrasi Terpimpin. Idham Chalid, sebagai salah satu pimpinan NU, berupaya mencarikan jalan keluar yang kompromistis. Sebuah jalan keluar yang tidak menghilangkan Islam sebagai identitas NU, tetapi bisa sejalan dengan gagasan-gagasan Soekarno. Salah satunya dengan menjelaskan kedekatan dan kesesuaian Demokrasi Terpimpin dan praktek *syūra* dalam tradisi Islam. Inilah sebuah "Islam alternatif" -dalam arti alternatif dari yang dipraktekkan Masyumi, yang dijalankan NU di masa pemerintahan Soekarno.

Respon Idham Chalid atas Demokrasi Terpimpin meliputi pemikiran dan sikap politiknya. Hal ini tak bisa disangkal karena Idham adalah seorang pelaku sejarah: ia bukan pengamat yang "berjarak" dengan kenyataan. Gambaran pemikirannya terhadap sistem tersebut telah dibahas pada bab sebelumnya. Nyatalah

[19] Abd al-Wahab Khalaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh,* cet. ke-11 (Kairo: Dar al-Qalam, 1977), 86-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah bahwa Idham menerimanya atau seperti yang pernah ditulis oleh Feillard, "*tidak memiliki keberatan yang mendasar terhadap Demokrasi Terpimpin.*"[20]

Ketika beredar berita mengenai pelaksanaan Demokrasi Terpimpin lewat Dekrit Presiden, PBNU menyatakan tidak akan ikut campur. Tetapi, PBNU berpendapat bahwa "NU tidak dapat menghindar dari kewajiban untuk *amr ma'ruf nahi munkar*".[21] Untuk mencapai tujuan ini, NU mau tidak mau harus mengesampingkan keberatannya atas Demokrasi Terpimpin, kemudian mencari posisi dalam pemerintahan agar bisa menanamkan pengaruhnya.

Sikap PBNU ini merupakan sikap Idham dan mayoritas tokoh-tokoh partai NU di bawah pimpinan Kiai Abdul Wahab Chasbullah. Jadi atas dasar *amr ma'ruf nahi munkar* itulah Idham bersedia menerima Demokrasi Terpimpin. Sikap (menerima) atas dasar pemikiran (*amr ma'ruf nahi munkar*) ini pulalah yang nantinya turut membentuk pemikirannya tentang Demokrasi Terpimpin : yakni bahwa Islam dengan *syūra*-nya sesuai dengan Demokrasi Terpimpin.

Suatu hal lalu menjadi jelas bahwa, baik pemikiran "*amr ma'ruf nahi munkar*" maupun "Islam sesuai dengan Demokrasi Terpimpin", semuanya adalah refleksi dari sikap "akomodatif" pada Idham. Akibat-akibat dari sikap inilah yang hendak penulis analisa pada bagian ini. Satu hal lagi yang tidak bisa dihindari, bahwa sikap dan pemikiran Idham juga mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil NU, karena posisinya di sana turut mewarnai perkembangan situasi. Dan

---

[20] Andree Feillard, *NU vis-a-vis Negara*, 90.
[21] PBNU, *Siaran ke XXI*, 1 September 1959. Dikutip dari Greg Fealy, *Ijtihad*, 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebaliknya, reaksi terhadap NU juga merupakan reaksi terhadap sebagian pemikiran dan sikap politik Idham.

Dengan adanya prinsip ini NU selalu mengambil sikap akomodatif, toleran dan menghindari sikap ekstrim dalam berhadapan dengan spektrum budaya apapun.

Pengaruh gerakan dan pemikiran NU yang akomodatif dan kompromistis tersebut, disinyalir oleh para pakar dan pengamat sangat berpengaruh dalam perjalanan politik NU di Indonesia. Implikasi penting peranan gerakan dan pemikiran NU ini membuat NU menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan politik Indonesia yang di mata orang lain cenderung "kontroversial, polemis, dan akomodatif", terutama ketika NU memberikan "*treatment*" terhadap kekuasaan.

Salah satu ciri melekat dari pendekatan yang *fiqh oriented* adalah bahwa paradigma keagamaan NU selalu dikalkulasikan atas pertimbangan hukum yang bermuara pada aspek *maṣlaḥah* dan *mafsadah*. Melihat dari gerakan pemikiran keagamaan dan pertimbangan-pertimbangan hukum NU tersebut, penulis mengidentifikasikan dan meneliti sejauhmana pemikiran NU tersebut berpengaruh terhadap sistem tata negara di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Atas dasar *amr ma'ruf nahi munkar* Idham bersedia menerima Demokrasi Terpimpin. Sikap (menerima) atas dasar pemikiran (*amr ma'ruf nahi munkar*) ini yang membuatnya berpendapat bahwa Islam dengan *syūra*-nya sesuai dengan Demokrasi Terpimpin. Suatu hal lalu menjadi jelas bahwa, baik pemikiran "*amr ma'ruf nahi munkar*" maupun "Islam sesuai dengan Demokrasi Terpimpin", semuanya adalah refleksi dari sikap "akomodatif" pada Idham. Pemikiran Idham Chalid tentang tentang Demokrasi Terpimpin dilatarbelakangi oleh kehidupannya yang merupakan perpaduan antara seorang yang dididik dari kultur Islam Tradisionalis yang dipadukan dengan corak pemikiran modernis.
2. Dalam konteks Fiqh Siyasah, Demokrasi Terpimpin menurut pandangan Idham Chalid dapat bersesuaian dengan nilai-nilai Islam. Asalkan mekanisme demokrasi dijalankan melalui jalan *al-syūra* (musyawarah) serta dibarengi dengan pengawasan oleh rakyat. Relevansinya terletak pada gagasannya untuk tetap mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Sikap dan pandangan moderat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(tawāzun), toleran *(tasāmuh),* mengambil jalan tengah *(tawassuṭ),* dan bersikap adil *(i'tidal),* yang dianut merupakan pilihan tepat yang inklusif dan akomodatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sikap dan pendangannya masih relevan untuk diimplementasikan dalam kondisi sekarang.

B. Saran-saran

1. Hendaknya pembaca meneladani jejak langkah dan perjuangan Idham Chalid terutama dalam perjuangan di bidang politik politik kebangsaan.
2. Sebaiknya wacana keislaman, kenegaraan, dan pandangan politik Sunni, gagasan-gagasan Idham Chalid merupakan sebuah keniscayaan untuk diaplikasikan demi tegaknya Islam rahmatan li al-alamin di Indonesia.
3. Alangkah bagusnya jika kemudian ada penelitian tentang gagasan-gagasan Idham Chalid di berbagai bidang. Sebab, meskipun tokoh berpengaruh, penelitian yang dilakukan untuk mengkaji pemikiran Idham Chalid masih minim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia,* Jakarta, Gramedia, 1986

al-Mawardi, Imam Abi al-Hassan 'Ali Muhammad Habib al-Basri al-Baghdadi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah walwilayat al-Diniyyah,* Beirut, Dar al-Fikr, 1960

Akbar, Asep Taufik, *Akar-akar pergumulan kelahiran Konsep Wali al-amr al-dharury bi al-syaukah,* Jurnal Taswirul Afkar edisi No 17 th 2004, 101.

Anam, Choirul, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama,* Solo, Jatayu Press, Cet. I, 1985

Chalid, Idham, *Islam dan Demokrasi Terpimpin,* Jakarta, Endang-Pemuda, 1965.

_____, *Mendajung dalam Taufan,* Jakarta, Endang-Api Islam, 1966

Crouch, Herbert, *Militer & Politik di Indonesia,* Jakarta, Sinar Harapan, 1999.

Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967,* Yogyakarta, LKIS, Cet. II, 2003

_____, dan Greg Barton (Ed), *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara,* Yogyakarta, LKiS, 1997

Federspiel, Howard M., "Soekarno dan Apolog-apolog Muslimnya", terj. Jajat Burhanuddin dan Nasrullah Ali Fauzi, dalam *Ulumul Quran* no. 7, Jakarta: LSAF, 1990, 36.

Feillard, Andree, *NU Vis A vis Negara,* Yogyakarta: LKIS, 2008

Feith, Herbert, *Soekarno-Militer Dalam Demokrasi Terpimpin,* Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995

Gaffar, Afan, *Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003

Haidar, Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik,* Jakarta, Gramedia, Cet. I, 1998

_____, *NU : Wawasan Sosio-Kultural dan Keagamaan,* Majalah Aula, Maret 1994

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim, Abd al-Hamid, *As-Sulam*, Jakarta, Sa'adiyah Putra, t.t.

Irsyam, Mahrus, *Ulama dan Politik, Upaya Mengatasi Krisis,* Jakarta, Yayasan Pengkhidmatan, 1984

Karim, Rusli, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Potret Pasang-Surut,* Jakarta, Rajawali Pers, 1993

Khalaf, Abd al-Wahab, *'Ilm Usūl al-Fiqh,* cet. ke-11, Kairo, Dar al-Qalam, 1977

Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan : Studi tentang Percaturan dalam Konstituante,* Jakarta, LP3ES, 1986

_____, *Islam Dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin,* Jakarta, Gema Insani Press, 1996

Machfoedz, Maksoem, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama,* Surabaya, Yayasan Persatuan Umat, 1982.

Mandan, Arief Mudatsir (editor), *Napak Tilas Perjuangan Idham Chalid: Tanggungjawab Politik NU dalam Sejarah,* Jakarta, Pustaka Indonesia Satu. Cet. I, 2008

Muhajir, Ahmad, *Idham Chalid: Guru Politik Orang NU,* Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pesantren, Cet. I, Juni 2007

Muhtadi, Asep Saiful, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama : Pergulatan Pemikiran Politik Radikal Dan Akomodatif,* Jakarta, LP3ES, Cet I, 2004

Muzadi, A. Muchith, *Mengenal Nahdlatul Ulama,* cet. IV, Surabaya, Khalista, 2006

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung, Rosdakarya, Cet. VII, 2002

Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta, Raka Sarasin, cet. I, 2000

Poesponegoro, Marwati Djoened dkk., *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI,* Jakarta, Depdikbud-Balai Pustaka, 1993

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah,* Bandung: Prenada Media, Cet. I, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ridwan, Nur Khalik, *NU dan Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan,* Yogyakarta, Arruz, 2010

Rokan, Asro Kamal, "KH Idham Chalid Kini", *(Republika, 7/5/2008).*

Subhan, Mohammad, *Antologi NU : Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah,* Surabaya, Khalista, 2007

Soebagijo I.N, *KH.Masjkur: Sebuah Biografi,* Jakarta, Gunung Agung, 1982

Suprapto, Bibit, *Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat hidup, Karya, dan Sejarah perjuangan 157 Ulama Nusantara,* Jakarta, Gelagar Media Indonesia

Tim Penulis Tempo, *Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1981-1982,* Jakarta, Graffiti, 1981

Tim Penulis PBNU, *Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah 1926,* Bandung, Risalah, 1985.

Ulum, Bahrul, *Bodohnya NU atau NU Dibodohi,* Yogyakarta, ar-Ruzz, 2003

Van Bruinessen, Martin, *NU: Tradisi Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru,* Yogyakarta, LKIS, 1999

Zuhri, Saifuddin, *Guruku Orang-Orang dari Pesantren,* Yogyakarta, LKiS, 2001

Zuhri, Saifuddin, *Berangkat dari Pesantren,* Jakarta, Gunung Agung, 1987

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan,* Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Cet. III, 2004

http://www.reformasi.net46.net/index.php?p=1_11_Demokrasi-Terpimpi (20 Januari 2010)

http://pcinu-mesir.tripod.com/ilmiah/pusaka/ispustaka/buku03/001_1.txt

kabarhaji.com/.../kh-idham-chalid-kiprah-ulama-dan-politisi-handal-nusantara. Diakses pada 30 Mei 2011.

Pertengkaran Elit Politik Nahdlatul Ulama (1960-Hingga Kini): Sebuah Wawancara dengan Greg Fealy..http://www.crcs.ugm.ac.id/news_ind.php?news_id=200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://www.reformasi.net46.net/index.php?p=1_11_Demokrasi-Terpimpin. Diakses pada tanggal 29 Mei pukul 22.31 WIB

http://www.majalah-historia.com/majalah/historia/berita-272-politisi-air-yang-tak-lagi-mengalir.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id